



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
RESISTANCE

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

Biro Hukum

Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

**Biro Hukum
goes to WBK**
#Berbahagia melayani
Realisasi ekonomi biru
GOOD JOB!



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

KATA PENGHANTAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hodayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan bagi stakeholders. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja secara rinci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

Sebagai saranan evaluasi atas capaian, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja dengan anggaran yang mendukung pelaksanaan, sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta produktivitas. dalam mendukung *core value* "Berbahagia Melayani, Berkinerja Sepenuh Hati", Biro Hukum selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai capaian/permasalahan sebagai acuan penyusunan program di tahun selanjutnya.

Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dipahami dengan baik dan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders serta memberi kontribusi dalam evaluasi peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum

Jakarta, 17 Januari 2025
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF



Anggaran 2024:
Rp12.448.837.000
Realisasi 2024
Rp12.032.374.432

Pencapaian kinerja yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum merupakan wujud nyata dari hasil pencapaian atas target yang terlaksana Biro Hukum dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selama tahun 2024, Biro Hukum telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan dari sasaran strategis yang terdiri dari Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum.



Biro Hukum juga didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak **49 Pegawai**

Selama tahun 2024, Biro Hukum telah melakukan 2 (dua) kali penyesuaian Perjanjian sebanyak. Pada pengesahan tanggal 15 Januari 2024, Biro Hukum menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja dan 16 (enam belas) indikator kinerja. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Biro Hukum kembali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja dan 16 (enam belas) indikator kinerja karena terdapat penyesuaian nomenklatur pada indikator kinerja berdasarkan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 dan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal 2024.

Pencapaian atas target indikator akan menjadi Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat menjadi NKO. NKO atau nilai pencapaian sasaran Kegiatan Biro Hukum pada Tahun 2024 mencapai 111,56%, dengan rincian sebagai berikut



Tabel 1
Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum	Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	80	100	120
	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65	83,94	120
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP (%)	100	100	100
	Permasalahan Hukum melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100	140	120
	Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100	140	120
	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100	121,73	120
	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100	166,67	120
	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP (Nilai)	92	99	107,61



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	Nilai PM SAKIP Biro Hukum	84	88,50	105,36
	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (Indeks)	85	90,18	106,09
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum (%)	100	100	100
	Persentase Unit Kerja yang Menetapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum (%)	94	133,33	120
	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95	99,72	104,97
	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	95	100	105,26
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100	100	100
	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hukum (Nilai)	75	88,75	118,33



Dalam mendukung pencapaian kinerja di atas, Pada tahun 2024, pagu anggaran Biro Hukum sebesar Rp16.217.199.000, namun mendapat blokir 2 kali Automatic Adjustment (AA) dan pengurangan pagu untuk diserahkan ke Biro Umum dan PBJ yaitu Rp3.768.362.000. Sehingga pagu akhir Biro Hukum sebesar Rp12.448.837.000. Biro Hukum mengelola anggaran sebesar Rp12.448.837.000 dengan realisasi 2024 Rp12.032.374.432, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2
Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024

Layanan	Pagu	Target Realisasi	%	Realisasi	%	Sisa
Layanan Hukum	Rp6.669.051.000	Rp6.647.043.000	99,66	Rp4.209.037.295	99,66	Rp14.301.705
Layanan Bantuan Hukum	Rp427.169.000	Rp426.101.000	99,75	Rp426.977.609	99,96	Rp191.391
Layanan Umum	Rp3.257.780.000	Rp3.221.944.000	98,89	Rp3.249.916.284	99,76	Rp7.863.716
Layanan Perkantoran	Rp2.094.837.000	Rp2.085.619.000	99,55	Rp2.093.551.511	99,94	Rp1.285.489
JUMLAH	Rp12.448.837.000	Rp12.380.707.000	99,45	Rp12.413.394.401	99,72	Rp35.442.599

Selain memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum, Biro Hukum melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, juga melaksanakan kegiatan konsultasi publik yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memberikan informasi kepada publik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, Biro Hukum telah melaksanakan 15 kegiatan yang terdiri dari



Konsultasi Publik Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (puerulus) di Nelayan

Konsultasi Publik Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (puerulus) di Nelayan



Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Konsultasi publik rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (puerulus) di Nelayan





Konsultasi Publik 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Pengawasan Ruang Laut.

Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengean Tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dan Sosialisasi Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan



Konsultasi Publik Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (puerulus) di Nelayan

Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Persetujuan di Bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tentang Konservasi Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Yang Berada di Luar Yurisdiksi Nasional (Agreement Under The United Nations Convention On The Law Of The Sea On The Conservation And Sustainable Use Of Marine Biological Diversity Of Areas Beyond National Jurisdiction)



Forum Hukum Tahun 2024 "Dukungan Hukum dalam Mewujudkan Kebijakan Pengellaan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biro Menuju Indonesia Emas 2045





Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mitigasi Permasalahan Hukum terkait Pengelolaan Barang Milik Negara



Forum Konsultasi Publik Pelayanan JDJH KKP



Internalisasi Core Value ASN “BerAkhlaq” dan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan



Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024, Biro Hukum telah menyelesaikan target dengan sangat baik dan optimal. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi memotivasi aparatur negara di Lingkungan Biro Hukum untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dadaran dan tujuan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun dapat dicapai dengan baik. Rangkuman keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dapat dilihat pada tabel aplikasi Kinerjaku untuk Tahun 2024.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

PENGHARGAAN



PENGHARGAAN



Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-OT.03.03-74, tanggal 11 November 2024, hal Hasil Penilaian atas IRH Tahun 2024, KKP berhasil mencapai nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 100 dengan kategori AA (Istimewa) serta KKP berhasil menerima penghargaan Terbaik II Kategori Tingkat Kementerian Hasil Penilaian Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2023, JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAN DAFTAR GAMBAR



DAFTAR ISI

i	Kata Pengantar
ii	Ringkasan Eksekutif
ix	Penghargaan
x	Daftar Isi
xi	Daftar Tabel
xiii	Daftar Gambar
01	BAB I - Pendahuluan
11	BAB II - Perencanaan Kinerja
14	BAB III - Akuntabilitas Kinerja
114	BAB IV - Prestasi dan Kinerja Lainnya
118	BAB V - Penutup
	LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

iii	Tabel 1 : Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024
v	Tabel 2 : Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024
13	Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024
14	Tabel 4 : Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, Renja 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
17	Tabel 5: Target dan Capaian Biro Hukum Tahun 2024
18	Tabel 6 : Indikator Kinerja 1
26	Tabel 7 : Indikator Kinerja 2
41	Tabel 8 : Indikator Kinerja 3
46	Tabel 9 : Indikator Kinerja 4
53	Tabel 10 : Indikator Kinerja 5
60	Tabel 11 : Indikator Kinerja 6
71	Tabel 12 : Indikator Kinerja 7
80	Tabel 13 : Indikator Kinerja 8
90	Tabel 14 : Indikator Kinerja 9
91	Tabel 15 : Kategori Penilaian PM SAKIP
92	Tabel 16 : Hasil PM SAKIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024
94	Tabel 17 : Indikator Kinerja 10
95	Tabel 18 : Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2025
96	Tabel 19 : Indikator Kinerja 11



DAFTAR TABEL



- 96 Tabel 20 : Rincian Realisasi IK Batas Tertinggi
Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan
BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal
- 98 Tabel 21 : Indikator Kinerja 12
- 99 Tabel 22 : Grafik Target dan Realisasi IK
Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen
Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024
- 99 Tabel 23 : Indikator Kinerja 13
- 100 Tabel 24 : Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja
Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2024
- 101 Tabel 25 : Indikator Kinerja 13
- 101 Tabel 26 : Pagu beserta realisasi anggaran Biro
Hukum
- 102 Tabel 27 : Capaian Realisasi Anggaran
Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024
- 103 Tabel 28 : Indikator Kinerja 15
- 106 Tabel 29 : Indikator Kinerja 16
- 108 Tabel 30: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 112 Tabel 31 : Daftar Peraturan Perundang-undangan
pada Laman jdih.kkp.go.id



DAFTAR GAMBAR



02	Gambar 1 : Core Value Biro Hukum
03	Gambar 2 : Kedudukan Biro Hukum
05	Gambar 3 : Susunan Keanggotaan Tim Kerja
05	Gambar 4 : Demografi Pegawai Biro Hukum
79	Gambar 5 : Tim Teknis JDIH
80	Gambar 6 : Hasil Penilaian Pengelolaan JDIH Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya diperlukan penyelenggaraan SAKIP yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan program, dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dijelaskan juga tujuan dari penyusunan laporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja Biro Hukum termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024, serta bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Hukum atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai laporan atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal, memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum untuk meningkatkan kinerjanya di kemudian hari dan juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan sekaligus untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien Budaya Organisasi Biro Hukum telah menetapkan core value "**Berbahagia Melayani, Berkinerja Sepenuh Hati**" yang menjadi semangat bagi seluruh anggota pegawai Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dengan makna

1. Berbahagia Melayani:

- **Semangat Pelayanan Tulus:** Melayani bukan sekadar tugas, tetapi dilakukan dengan kebahagiaan dan keikhlasan. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- **Kepuasan Bersama:** Memberikan pelayanan yang berkualitas mendatangkan kebahagiaan, tidak hanya untuk penerima layanan tetapi juga bagi pemberi layanan karena terciptanya hubungan yang saling menghormati.

2. Berkinerja Sepenuh Hati:

- **Dedikasi Penuh:** Bekerja dengan sepenuh hati berarti menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, dan ketulusan tanpa setengah-setengah.
- **Profesionalisme:** Setiap pekerjaan dilakukan dengan standar tinggi, efisiensi, dan inovasi untuk mencapai hasil terbaik.
- **Mengutamakan Integritas:** Tidak hanya fokus pada hasil kerja, tetapi juga menjaga prinsip kejujuran dan transparansi.



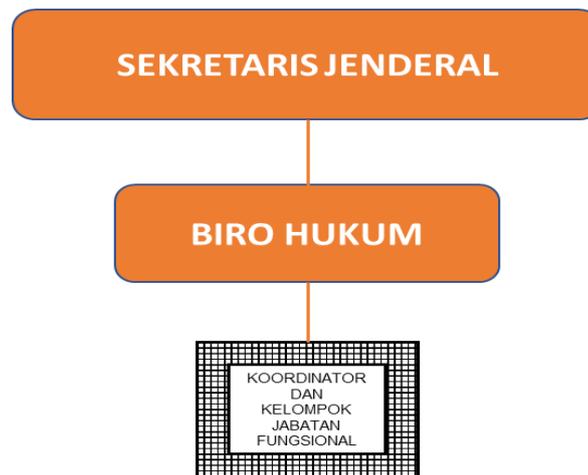
Gambar 1
Core Value Biro Hukum





1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan struktur organisasi sebagai berikut



Gambar 2
Kedudukan Biro Hukum

1.4. Tugas, Fungsi, Program, dan Kegiatan Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan instrumen hukum, rancangan perjanjian nasional, dan instrumen hukum internasional, serta advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi yang terdiri dari

- a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, konsultasi publik, dan harmonisasi rancangan peraturan perundangundangan dan instrumen hukum;
- b. pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundangundangan dan instrumen hukum;
- c. koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian nasional;



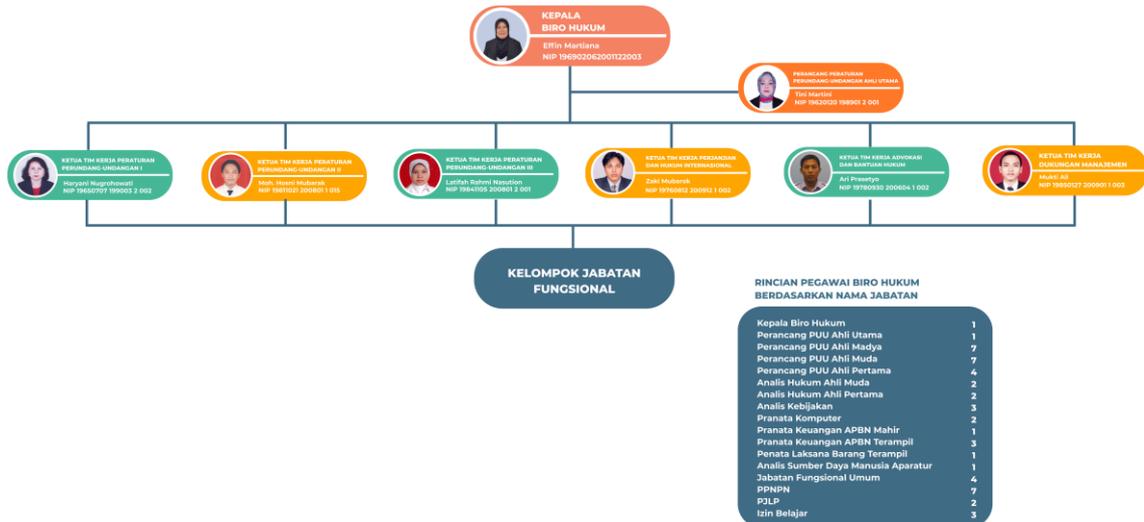


- d. koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan instrumen hukum internasional;
- e. koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hukum

Program dan kegiatan Biro Hukum secara konsisten mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas terdapat satu Kepala Biro dan 6 ketua tim kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu

- a. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III;
- d. Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum;
- e. Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional;
- f. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen.





Gambar 3
Susunan Keanggotaan Tim Kerja

1.5. Sumber Daya Manusia Biro Hukum

Sumber daya manusia adalah aset utama organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Biro Hukum. Pada tahun 2024, total pegawai Biro Hukum sebanyak 49 orang yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional, dan pejabat administrasi dengan komposisi sebagai berikut



Gambar 4
Demografi Pegawai Biro Hukum



1.6. Potensi

Saat ini, mengembangkan potensi unit kerja sangatlah berpengaruh untuk hasil kinerja yang lebih maksimal. Beberapa potensi yang telah dimiliki oleh Biro Hukum, antara lain;

- a. komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mendorong generasi milenial untuk terus mengembangkan potensi diri dan melahirkan ide-ide baru yang dapat menunjang kinerja organisasi agar terus berkembang;
- c. mengadakan pelatihan-pelatihan, pendalaman materi, dan bimbingan teknis untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum;
- d. sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum;
- e. pembaharuan informasi hukum pada JDIH yang transparan, komunikatif, dan adaptif;
- f. menindaklanjuti Program Legislasi Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- g. komitmen Biro Hukum untuk terus menciptakan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dalam setiap program kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Progsun 2024 secara berkala;
- h. selalu terbuka dalam memberikan pelayanan pendampingan hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- i. komitmen Biro Hukum untuk terus melakukan pendampingan dalam penyusunan draft perjanjian agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelaziman.





1.7. Tantang

Untuk menghasilkan *output* yang lebih baik dan meningkatkan optimalisasi kinerja dalam organisasi, perlu dilakukan penyempurnaan dari faktor internal dan faktor eksternal di lingkungan Biro Hukum untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal, di antaranya

a. Faktor Internal

1. Keterbatas jumlah ASN dan non-ASN yang menangani tugas dan fungsi Biro Hukum tidak optimal dalam menangani beban kerja yang semakin meningkat dan beragam, sehingga perlu diadakan Pengadaan ASN Tahun 2025; dan
2. Terbatasnya pendidikan dan pelatihan yang diperoleh masing-masing ASN dan non-ASN yang dapat meningkatkan kompetensi;

b. Faktor Eksternal

1. kesiapan dalam penyusunan rancangan PUU melalui mekanisme Izin Prakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - a) Monitoring setiap permohonan izin prakarsa melalui evaluasi triwulanan bersama dengan seluruh unit kerja eselon I serta memastikan pembentukan mekanisme dan tata cara persetujuan izin prakarsa oleh Menteri;
 - b) Meningkatkan koordinasi melalui rapat pembahasan dan mengirimkan nota dinas/ memorandum secara formal apabila terdapat prosedur atau dokumen yang masih harus dilengkapi;
 - c) Mengoptimalkan peran dan kapasitas pejabat fungsional Perancang dan Analis Hukum di setiap unit kerja eselon I dengan mengadakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum
2. Dokumen Kajian Teknis pada Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Keputusan Menteri yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat perlu memenuhi muatan sesuai Metode Regulatory Impact Analysis (RIA)





- a) Berkoordinasi secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Kepala Unit Kerja lingkup Setjen melalui Sekretaris Jenderal untuk memperbaiki Dokumen Kajian Teknis dengan memenuhi materi muatan;
 - b) Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepmen KP Nomor 96/KEPMEN-KP/2020 terkait implementasi penyusunan Kajian Teknis dengan metode RIA;
 - c) Meningkatkan koordinasi melalui rapat pembahasan dan penyelenggaraan FGD bersama Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja pengusul; dan
 - d) Menyelenggarakan konsultasi publik sebagai bentuk *Meaningful Participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
3. Mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat dan pendalaman materi;
 4. perlu diadakan pelatihan legal audit dokumen dalam rangka inventarisasi seluruh dokumen data dukung;
 5. sinkronisasi jadwal dengan aparat penegak hukum dan saksi/ahli;
 6. bedah kasus/gelar perkara, briefing dan simulasi;
 7. pemerataan dan penguatan pemahaman proses penyidikan oleh PPNS perikanan;
 8. mitigasi risiko permasalahan penyidikan
 9. mitigasi risiko permasalahan PTUN dengan memastikan adanya kebenaran kewenangan, prosedur, dan substansi perizinan
 10. Draft kerja sama dari unit kerja pengusul belum mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional
 - a) berkoordinasi baik dengan bersurat atau melalui pertemuan formal atau informal dengan unit kerja eselon I/unit kerja/ kementerian terkait;





- b) Menyampaikan tahapan pelaksanaan kerja sama sesuai Permen 23 Tahun 2022 dalam setiap pembahasan naskah kerja sama;
 - c) Melaksanakan dan mengikuti rapat pembahasan draft naskah kerja sama;
 - d) Pemberian masukan, penyempurnaan, dan asistensi mengenai legal drafting maupun substansi perjanjian pada saat pembahasan draf perjanjian;
11. Draf Perjanjian internasional belum mengikuti bahasa Inggris hukum yang seharusnya sehingga bisa menimbulkan sengketa
- a) memberikan peningkatan kapasitas terhadap para pegawai untuk dapat meningkatkan pemahaman bahasa Inggris hukum;
 - b) melakukan pendampingan pada saat drafting perjanjian terutama perjanjian internasional
12. Draf perjanjian dari unit kerja pengusul tidak mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional
- a) berkoordinasi baik dengan bersurat atau melalui pertemuan formal atau informal dengan unit kerja eselon I/unit kerja/ kementerian terkait;
 - b) Menyampaikan tahapan pelaksanaan kerja sama sesuai Permen 23 Tahun 2022 dalam setiap pembahasan naskah kerja sama;
 - c) Melaksanakan dan mengikuti rapat pembahasan draft naskah kerja sama;
 - d) Pemberian masukan, penyempurnaan, dan asistensi mengenai legal drafting maupun substansi perjanjian pada saat pembahasan draf perjanjian.

1.8. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan capaian kinerja Biro Hukum berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja



(*performance result*) tahun 2024 dengan rencana kerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan tentang latar belakang, stuktur organisasi Biro Hukum tugas, fungsi, program, dan kegiatan Biro Hukum, sumber daya manusia Biro Hukum, dan pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan secara umum ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro Hukum yang telah dicapai dalam satu tahun.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

4. Bab IV Simpulan

Bab ini menjelaskan simpulan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun Anggaran 2024 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pencapaian visi dan pelaksanaan misi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan rencana strategis juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan pencapaian dan sasaran organisasi secara.



Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci, dan dapat diukur. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dalam konteks percepatan pembangunan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Biro Hukum memberikan kontribusi sesuai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan





informasi hukum telah menetapkan sasaran yang didasari oleh terwujudnya birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Biro Hukum telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat eselon II dengan pejabat eselon I, dan pejabat eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selama tahun 2024, Biro Hukum telah melakukan 2 (dua) kali penyesuaian Perjanjian sebanyak. Pada pengesahan tanggal 15 Januari 2024, Biro Hukum menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja dan 16 (enam belas) indikator kinerja. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Biro Hukum kembali menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja dan 16 (enam belas) indikator kinerja karena terdapat penyesuaian nomenklatur pada indikator kinerja berdasarkan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 berikut

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TAHUN
		2024 (15 Januari 2024)	2024 (23 Oktober 2024)
Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum	1. Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	80	80
	2. Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65	65





SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024	
		(15 Januari 2024)	(23 Oktober 2024)	
	3. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP (%)	100	100	
	4. Permasalahan Hukum melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100	100	
	5. Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100	100	
	6. Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100	100	
	7. Instrumen Hukum Internasional Bidang Jelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100	100	
	8. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP (Nilai)	92	92	
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9. Nilai PM SAKIP Biro Hukum	84	84
		10. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (Indeks)	85	85
11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum (%)		100	100	
12. Persentase Unit Kerja yang Menetapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum (%)		94	94	
13. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)		95	95	
14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)		95	95	
15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)		100	100	
16. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hukum (Nilai)		75	75	





2.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024

Biro Hukum melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun Anggaran 2024, Biro Hukum melaksanakan beberapa kegiatan yaitu penyiapan produk hukum, advokasi, serta perjanjian dan dijabarkan dalam 4 (empat) *output* sebagai berikut

1. Layanan Hukum;
2. Layanan Bantuan Hukum;
3. Layanan Umum; dan
4. Layanan Perkantoran

Output-output tersebut untuk memenuhi sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Biro Hukum.

2.4. Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, Renja 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

penetapan perjanjian kinerja dan penentuan target Tahun 2024 disusun berdasarkan kebijakan arah kebijakan nasional dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 sebagaimana telah tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024, Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024, dan juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4
Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, Renja 2024,
dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024	Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum	1. Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	80	80	80
	2. Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65	65	65
	3. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan	100	100	100





Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024	Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
	Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP (%)				
	4. Permasalahan Hukum melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100	100	100	
	5. Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100	100	100	
	6. Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100	100	100	
	7. Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100	100	100	
	8. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP (Nilai)	92	92	92	
	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9. Nilai PM SAKIP Biro Hukum	84	84	84
		10. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (Indeks)	85	85	85
11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum (%)		100	100	100	
12. Persentase Unit Kerja yang Menetapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum (%)		94	94	94	
13. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)		95	95	95	
14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)		95	95	95	
15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)		100	100	100	
16. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hukum (Nilai)		75	75	75	





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang didapatkan dari capaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja selain digunakan untuk melihat pencapaian target kinerja, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana namun juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hasil dari pengukuran kinerja ini dapat menggambarkan sejauh mana Biro Hukum dapat merealisasikan visi dan misi Sekretariat Jenderal serta tujuan yang tertuang dalam perencanaan kinerja, sedangkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024, Biro Hukum telah melakukan usaha yang maksimal dengan melibatkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pencapaian sasaran kegiatan dan bahan evaluasi kinerja. Dalam suatu organisasi, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum.

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran, pengumpulan dan pelaporan kinerja di lingkungan Biro Hukum dilakukan oleh Tim Pengelolaan Kinerja pada Biro Hukum berdasarkan Surat Perintah Nomor B.13/SJ.4/KP.440/I/2023, tanggal 8 Januari 2024 dengan menggunakan Sistem Monitoring Kinerja Biro Hukum pada laman <https://sites.google.com/view/simanjabirohukum/beranda> serta aplikasi Kinerjaku. Proses penghitungan kinerja didasarkan oleh formula yang tercantum



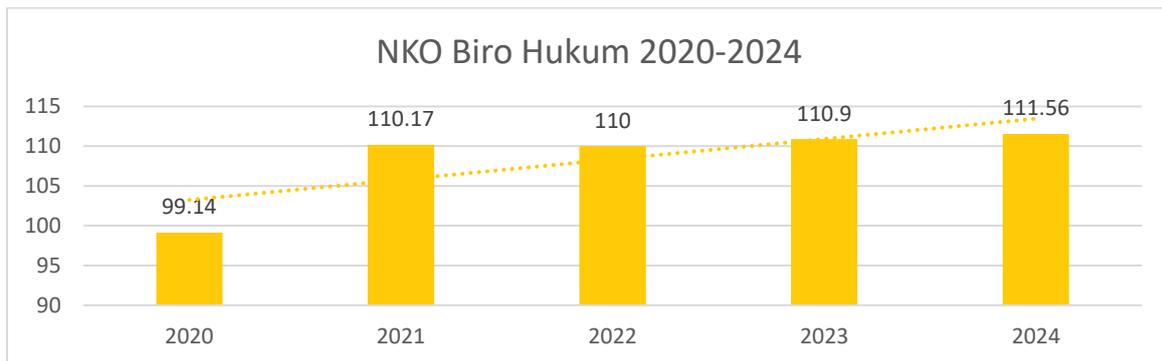


pada manual indikator kinerja yang telah ditetapkan Kepala Biro Hukum. Berikut merupakan realisasi capaian kinerja Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 5
Target dan Capaian Biro Hukum Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum	Indeks Reformasi Hukum KKP	Indeks	80	100	120
	Indeks Kualitas Kebijakan KKP	Indeks	65	83,94	120
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Persentase	100	100	100
	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	Persentase	100	140	120
	Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	Persentase	100	140	120
	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	Persentase	100	121,73	120
	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	Persentase	100	116,67	120
	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92	99	107,61
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	Nilai PM SAKIP Biro Hukum	Nilai	84	88,50	105,36
	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum	Indeks	85	90,18	106,09
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum	Persentase	100	100	100
	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum	Persentase	94	133,33	120
	Persentase Penyerapa Anggaran Biro Hukum	Persentase	95	99,72	104,97
	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	Persentase	95	100	105,26
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	Persentase	100	100	100
	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Biro Hukum	Nilai	75	88,75	118,33





Dalam mencapai sasaran program, Biro Hukum telah mengevaluasi dan menganalisis kinerja dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2024 sebesar 111,56%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2023, terdapat kenaikan nilai sebesar 0,66%. Kenaikan nilai kinerja organisasi dikarenakan terdapat 13 indikator kinerja yang mencapai nilai di atas 100%. Tercapainya Kinerja Biro Hukum pada didasarkan dengan analisis sasaran kinerja yang telah ditetapkan yaitu

Sasaran Kinerja

1. Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum

Berikut merupakan uraian kinerja yang telah dicapai, yaitu

IK 1 Indeks Reformasi Hukum KKP

Tabel 6
Indikator Kinerja 1

SK-1	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum										
IK-1	Indeks Reformasi Hukum KKP										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	77,66	96,44	80	100	120	3,56	80	100	

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan





Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas 4 (empat) variabel, yaitu

1. Variabel I, tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Bobot 25);
2. Variabel II, kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dengan (Bobot 25);
3. Variabel III, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu dengan (Bobot 30); dan
4. Variabel IV, penataan database peraturan perundang-undangan (Bobot 20)
Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 3 Tahun 2024 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Tim Penilai telah melakukan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah menyerahkan Berita Acara dalam link irh.kemenkumham.go.id dengan nilai 100. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum Nomor PPH.OT.03.03-74, tanggal 11 November 2024, hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, disimpulkan bahwa hasil Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 adalah 100.00 dengan kategori AA (Istimewa) tanpa catatan, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut

- I. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan bobot 25 dan KKP menyampaikan hasil penilaian 25





dengan rincian

a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangn;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/ lembaga.

Dengan nilai 10 dari bobot 10;

- 1) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin Prakarsa, dengan nilai 6 dari bobot 6;
- 2) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin





- Prakarsa, dengan nilai 4 dari bobot 4;
- b. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait) dengan nilai 15 dari bobot 15;
- II. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas, dengan nilai 25 dari bobot 25, dengan rincian
- a. Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan dengan nilai 7 dari bobot 7;
 - b. Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai 6 dari bobot 6;
 - c. Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang dengan nilai 12 dari bobot 12;
- III. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu dengan nilai 30 dari bobot 30, dengan rincian
- a. Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi, dengan nilai 8 dari bobot 8;
 - b. Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian dengan nilai 10 dari bobot 10;
 - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan nilai 6 dari bobot 6; dan
 - d. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi dengan nilai 6 dari bobot 6.





IV. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan dengan nilai 20 dari bobot 20, kriteria pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dengan nilai 20 dari bobot 20.

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Hukum KKP merupakan Indikator Kinerja yang bersifat eksternal, sehingga dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain. Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan nomor 2 hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Kementerian yang diserahkan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum pada tanggal 16 Desember 2024. Berikut merupakan 3 Kementerian yang mendapatkan penghargaan, yang terdiri atas;

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan nilai 100;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 100;
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan nilai 100.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 3,56 poin. Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu

1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IRH;
2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;
3. mengadakan pertemuan dengan para tim penilai Kementerian Hukum dan HAM; dan
4. melakukan reviu terkait data dukung yang dibutuhkan.





b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau *output* dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana "manfaat/hasil (*outcome*)" dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Indeks Reformasi Hukum sebesar 112.181.000,00 dari pagu sebesar 112.250.568,00 dengan persentase capaian sebesar 99,17%.

c. Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
1.	24-26 April 2024	1. Surat Tugas Nomor B.641/SJ.4/KP.440/IV/2024, tanggal 19 April 2024; 2. Surat Dinas Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.622/SJ.4/TU.330/IV/2024, tanggal 16 April 2024, hal Permohonan Koordinasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024; dan 3. Surat Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor HK.00/496/SETDA/2024, tanggal 18 April 2024, hal Penerimaan Kunjungan Koordinasi Indeks Reformasi Hukum	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I Biro Hukum	Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Biro Hukum KKP	
2.	14 Mei 2024	undangan dari Kepala	Biro Hukum	Ketua Tim	DJPKRL,	





NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
		Biro Hukum KKP, Nomor B.742 /SJ.4/TU.330/V/2024, tanggal 7 Mei 2024, hal Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Penilaian Mandiri IRH Tahun 2024	KKP	Kerja Perundang-undangan I Biro Hukum	DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Biro Hukum	
3.	21-22 Mei 2024	undangan dari Kepala Biro Hukum KKP, Nomor B.744/SJ.4/TU.330/V/2024, tertanggal 7 Mei 2024, hal Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024	Biro Hukum KKP	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I Biro Hukum	Perwakilan Plh. Kapusanev, BPHN, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, DJPKRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Biro Hukum	
4.	10-12 Juni 2024	a. Surat dinas Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali c.q. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.851/SJ.4/TU.330/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, hal Permohonan Koordinasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024; dan b. Surat tugas Kepala Biro Hukum Nomor B.912/SJ.4/KP.440/V/2024, tanggal 9 Juni 2024	Biro Hukum KKP	Kepala Bagian Hukum, Setda, Provinsi Bali	Biro Hukum, Setda Provinsi Bali dan Biro Hukum KKP	
5.	27 Juni 2024	undangan dari Kepala Biro Hukum KKP, Nomor	Biro Hukum KKP	Ketua Tim Kerja	Perwakilan Plh.	





NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
		B.1089/SJ.4/TU.330/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, hal rapat pengisian variabel III dalam rangka penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024		Perundang-undangan I Biro Hukum	Kapusanev, BPHN, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, DJPKRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Biro Hukum	
6.	17 Juli 2024	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.1225/SJ.4/TU.330/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024, hal Undangan Rapat Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP Tahun 2024	Biro KKP Hukum	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I Biro Hukum	Perwakilan Ph. Kapusanev, BPHN, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, DJPKRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Biro Hukum	
7.	27 Juli 2024	undangan dari Kepala Biro Hukum KKP, Nomor B.1298/SJ.4/TU.330/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, hal Undangan Rapat Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP Tahun 2024	Biro KKP Hukum	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I Biro Hukum	Perwakilan DJPKRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Biro Hukum	
8.	16 Desember 2024	Undangan dari Menteri Hukum Nomor M.HH-UM.04.02-18, tanggal 13 Desember 2024, hal undangan penerima penghargaan	Biro KKP Hukum	Menteri Hukum	Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Hukum	





IK 2 Indeks Kualitas Kebijakan KKP

Tabel 7
Indikator Kinerja 2

SK-1	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum									
IK-2	Indeks Kualitas Kebijakan KKP									
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	49,8%	83,94	65	83,94	120	0	65	83,94

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Adapun Manfaat Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yaitu

1. Instrumentasi menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat;
2. Mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional;
3. Media apresiasi dan advokasi kepada instansi Pemerintah sebagai pembelajaran baik dalam tata kelola kebijakan;
4. Peningkatan kualitas pembinaan Analisis Kebijakan; dan
5. Tersedianya sarana sharing pembelajaran (best practice) antar instansi Pemerintah.

Metode pelaksanaan pengukuran IKK, yaitu

1. Pengukuran dilakukan setiap **2 tahun sekali**, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi K/L/D dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran;
2. Pengukuran IKK dilakukan dengan mengambil populasi kebijakan K/L/D yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir dan telah diimplementasikan ≥ 1 tahun;





3. Pengukuran mengambil populasi Peraturan Menteri/Kepala LPNK (pusat) dan Perda dan Perkada (daerah) terakhir
4. Pengukuran dilakukan dengan dukungan sistem informasi IKK pada ikk.lan.go.id; dan
5. Sampel dalam sistem IKK ditentukan dengan formula statistik $\sqrt{N+1}$, dimana N merupakan populasi kebijakan terpilih.

Dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, terdapat instrument pengukuran yang harus dipenuhi. Instrumen tersebut terdiri atas 2 dimensi, 4 sub dimensi, 13 indikator, dan 39 pertanyaan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan (Bobot 45%)
 - a. Agenda Setting (Bobot 55%)

Merupakan pengukuran terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) indikator dengan 7 (tujuh) pertanyaan yaitu

- 1) Identifikasi dan Validasi Masalah (Bobot 55%)
 - a) Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,78;
 - b) Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dengan bobot 25% atau nilai 2,78;
 - c) Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannya dengan bobot 25% atau nilai 2,78; dan
 - d) Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,78.
- 2) Penyaringan dan Konsultasi publik terhadap masalah kebijakan (Bobot 45%)
 - a) Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan





ilmiah dengan bobot 30% atau nilai 2,73;

- b) Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu dengan bobot 35% atau nilai 3,19; dan
- c) Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan dengan bobot 35% atau nilai 3,19.

b. Formulasi Kebijakan (Bobot 55%)

Merupakan pengukuran dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur. Dalam tahapan ini terdapat 5 (lima) indikator dengan 12 pertanyaan yaitu

1) Karakteristik Mendasar (Bobot 10%)

- a) Kebijakan memiliki tujuan yang jelas dengan bobot 50% atau nilai 1,24; dan
- b) Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing-masing opsi telah dikaji kemanfaatannya dengan bobot 50% atau nilai 1,24.

2) Berorientasi ke Depan (Bobot 15%)

- a) Kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan bobot 50% atau nilai 1,86; dan
- b) Muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul dengan bobot 50% atau nilai 1,86.

3) Outward Looking (Bobot 20%)

- a) Rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan dengan bobot 40% atau nilai 1,98;
- b) Rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak dengan bobot 40% atau nilai 1,98; dan





- c) Rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung dengan bobot 20% atau nilai 0,99.
- 4) Berbasis Bukti (Bobot 40%)
 - a) Perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan analisis yang memadai dengan bobot 30% atau nilai 2,97;
 - b) Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai dengan bobot 40% atau nilai 3,96; dan
 - c) Penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk pembelajaran di masa mendatang dengan bobot 30% atau nilai 2,97.
- 5) Inovatif (Bobot 15%)
 - a) Kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan dengan bobot 30% atau nilai 1,11;
 - b) Kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dengan bobot 35% atau nilai 1,30; dan
 - c) Kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya dengan bobot 35% atau nilai 1,30.
- 2. Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (Bobot 55%)
 - a. Implementasi Kebijakan (Bobot 50%)

Merupakan Pengukuran dengan berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat 3 (tiga) indikator dengan 10 pertanyaan yaitu

 - 1) Pengorganisasian (Bobot 30%)
 - a) Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,06;
 - b) Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dengan





bobot 25% atau nilai 2,06;

- c) Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,06; dan
- d) Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dengan bobot 25% atau nilai 2,06.

2) Komunikasi Kebijakan (Bobot 35%)

- a) Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik dengan bobot 35% atau nilai 3,37;
- b) Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama dengan bobot 30% atau nilai 2,89;
- c) Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan dengan bobot 35% atau nilai 3,37.

3) Monitoring Implementasi Kebijakan (Bobot 35%)

- a) Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring dengan bobot 30% atau nilai 2,89;
- b) Ruang lingkup kegiatan monitoring dengan bobot 35% atau nilai 3,37; dan
- c) Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan dengan bobot 35% atau nilai 3,37.

b. Evaluasi Kebijakan (Bobot 50%)

Merupakan Pengukuran dengan melihat pada efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat 3 (tiga) indikator dengan 9 pertanyaan yaitu

1) Efektivitas (Bobot 40%)

- a) Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 5,50; dan





- b) Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 5,50.
- 2) Efisiensi (Bobot 15%)
- a) Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan dengan tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 2,06; dan
 - b) Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 2,06.
- 3) Evaluasi atas Penerimaan, Responsivitas, Dampak dan Kemanfaatan Kebijakan (Bobot 45%)
- a) Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan dengan bobot 20% atau nilai 2,48;
 - b) Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran dengan bobot 20% atau nilai 2,48;
 - c) Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran dengan bobot 20% atau nilai 2,48;
 - d) Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan bobot 20% atau nilai 2,48; dan
 - e) Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya dengan bobot 20% atau nilai 2,48.
- 1) Berdasarkan informasi pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks kualitas kebijakan sebesar **83,94** dengan kategori **sangat baik** (nilai antara kementerian belum diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara). IK Indeks Kualitas Keb. Capaian nilai tersebut





diatas target yang telah ditetapkan yaitu nilai 65 dengan kategori baik, dengan rincian pada masing-masing sampel Tahun 2023 yang meliputi

No	Peraturan Menteri	Nilai	Kategori
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional	75.16	Baik
2.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	80.83	Sangat baik
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut	70.64	Baik
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan	90.27	Unggul
5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	93.76	Unggul
6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	87.89	Sangat baik
7.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	84.83	Sangat baik

2) beberapa catatan Lembaga Administrasi Negara terhadap pengukuran indeks kualitas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, yaitu:

- a) secara garis besar, pengelolaan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi sampel penilaian indeks kualitas kebijakan Tahun 2023 sangat baik;
- b) *self assesement* penilaian kebijakan seluruhnya telah tuntas 100%;
- c) kondisi jawaban yang dipilih dalam seluruh sampel kebijakan telah didukung dengan data yang relevan sesuai dengan pedoman pengukuran indeks kualitas kebijakan; dan
- d) representasi pelibatan *stakeholder* dari kelompok di luar pemerintahan khususnya dari masyarakat sasaran kebijakan dan kelompok rentan telah dilakukan dan agar dapat terus dikelola dengan baik.





- 3) beberapa saran Lembaga Administrasi Negara kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan Tahun 2025:
 - a) dokumentasi penyusunan naskah hasil kajian atau analisis kebijakan yang mendukung proses kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan merupakan praktik baik yang perlu terus dilakukan untuk seluruh kebijakan-kebijakan yang diterbitkan;
 - b) pelibatan *stakeholder* dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok *stakeholder* di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan;
 - c) mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh *stakeholder* sasaran kebijakan;
 - d) melakukan monitoring kebijakan untuk memastikan ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan yang menjadi latar belakang kebijakan; dan
 - e) evaluasi dilakukan juga dengan pelibatan eksternal dan dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- 4) beberapa hal yang berkembang dalam rapat:
 - a) evaluasi kemanfaatan kebijakan harus dilakukan dengan berbasis penilaian oleh pihak lain di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) kelompok rentan merupakan kelompok yang paling terdampak dari adanya pemberlakuan regulasi dan dampaknya cenderung merugikan;
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menjelaskan subjek yang menjadi kelompok rentan;
 - d) perlu adanya inovasi dalam kebijakan yang mencerminkan indikator alternatif yang relevan;





- e) monitoring kebijakan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil implementasi;
 - f) hasil evaluasi terhadap regulasi harus memuat tindak lanjut;
 - g) terkait tujuan kebijakan perlu disusun matriks keterkaitan antara kebijakan dan program;
 - h) terkait *stakeholder* dan kelompok sasaran perlu disusun matriks subjek yang menjadi *stakeholder* dan kelompok sasaran;
 - i) terkait metode pencapaian tujuan perlu dibuatkan matriks perbandingan yang memuat metode pencapaian tujuan dan ketercapaian tujuan; dan
 - j) terkait kuisisioner implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan dapat mengacu pada *toolkit* 39 pertanyaan yang telah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara.
- 5) apabila merujuk pada penilaian Tahun 2023, maka penilaian Tahun yaitu seluruh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbit pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Juli 2024;
- 6) tim enumerator indeks kualitas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbit dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan 15 Maret 2024 diluar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur internal, bersifat rutin, terkait jabatan fungsional, dan pencabutan yang berpotensi menjadi populasi dalam penilaian Tahun 2025, sebanyak 28 (dua puluh delapan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 7) terhadap 28 (dua puluh delapan) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, masing-masing unit kerja eselon I penanggung jawab (PIC) perlu melakukan:





- a) identifikasi data dukung masing-masing Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan indeks kriteria penilaian sebagaimana terlampir; dan
- b) monitoring dan evaluasi terhadap implementasi masing-masing Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Hukum KKP merupakan Indikator Kinerja yang bersifat eksternal, sehingga dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain. Namun sumber informasi diterbitkan portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id, sehingga informasi penilaian antar kementerian/lembaga tidak diinfokan berdasarkan surat dinas ataupun keputusan.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penilaian IKK dilakukan sebanyak satu kali dalam dua tahun. Bila dilihat dari capaian tahun 2021, terdapat perbaikan nilai dan peningkatan nilai sebesar 49,8%. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dijadikan acuan Biro Hukum untuk dijadikan perbandingan karena penyampaian penilaian oleh LAN disampaikan secara personal kepada Kementerian PAN dan RB untuk diterbitkan pada laman Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu

1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IKK;
2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;
3. melengkapi data dukung dalam aspek implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
4. memperkuat koordinasi dengan eselon I yang merupakan pemrakarsa kebijakan; dan





5. melakukan koordinasi yang intens dengan Lembaga Administrasi Negara terkait kesesuaian data dukung yang telah dikumpulkan.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapan anggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang anggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam anggaran dari tujuan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem anggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana "manfaat/hasil (outcome)" dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Indeks Kualitas Kebijakan sebesar Rp96.094.277 dari pagu sebesar Rp128.375.000.

c. Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024

NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
1.	Senin, 18 Maret 2024	Rapat Persiapan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.469/SJ.4/TU.330/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, hal Undangan Rapat	Hotel Grand Savero Bogor	Kepala Bidang Formasi dan Seleksi pada Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), perwakilan DJPKRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Pusat Data	





NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
					Statistik, dan Informasi, serta Biro Hukum	
2.	Senin, 27 Mei 2024	Rapat Penyusunan Kuesioner Penilaian Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B.795/SJ.4/TU.330/V/2024, tanggal 17 Mei 2024, hal Undangan Rapat	Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV	perwakilan DJPKRL, DJPT, DJPB, DJPDSPKP, Inspektorat Jenderal, BPPSDMKP, BPPMHKP, serta Sekretariat Jenderal (Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, serta Biro Hukum)	
3.	Senin-Kamis, 8-11 Juli 2024	Kaji Lapang dan Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Populasi Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Tahap I (Batam)	Nota dinas Kepala Biro Hukum nomor 1350/SJ.4/TU.210/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024	Batam	Tim enumerator IKK (perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Biro Hukum) dengan stakeholders kebijakan, serta pengisian kuesioner oleh: <ol style="list-style-type: none"> pelaku usaha reklamasi; pelaku usaha sedimentasi di laut; Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kota Batam; pegawai Dinas Perikanan Kota Batam; Kelompok Masyarakat Pengawas di Kota Batam, Provinsi 	 





NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
					Kepulauan Riau; dan f. nelayan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	
4.	Selasa-Jumat, 11-12 Juli 2024	Kaji Lapang dan Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Populasi Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Tahap I (Cirebon)	Nota dinas Kepala Biro Hukum nomor 1350/SJ.4/TU.210/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024	Cirebon	Tim enumerator IKK (perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pusdatin, dan Biro Hukum), perwakilan PPN Kejawanan, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dengan stakeolders kebijakan, serta pengisian kuesioner oleh: a. nelayan (pemilik dan buruh); b. pelaku usaha coldstorage/ unit pengolahan ikan; c. nakhoda; dan d. anak buah kapal.	
5.	Rabu-Sabtu, 10-13 Juli 2024	Kaji Lapang dan Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Populasi Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Nota dinas Kepala Biro Hukum nomor 1350/SJ.4/TU.210/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024	Sukabumi	Tim enumerator IKK (perwakilan DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, serta Biro Hukum) dengan stakeolders kebijakan, serta pengisian kuesioner oleh: a. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sukabumi; b. Pengawas Perikanan	





NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
		Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Tahap I (Sukabumi)			<p>pada Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sukabumi;</p> <p>c. pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;</p> <p>d. pembudidaya ikan; dan</p> <p>e. nelayan kecil penangkap benih bening lobster Kabupaten Sukabumi.</p>	
6.	Senin, 30 September 2024	Rapat Pembahasan Data Dukung Indeks Kualitas Kebijakan	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal nomor B.1747/SJ.4/TU.330/I X/2024, tanggal 27 September 2024, hal Undangan Rapat	Konferensi video melalui aplikasi zoom	Perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan perwakilan KKP (DJPKRL, DJPT, DJPDSPKP, DJPSDKP, BPPSDMKP, Biro Keuangan, Pusdatin, dan Biro Hukum	
7.	Senin-Rabu, 2-4 Desember 2024	Kaji Lapang dan Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Populasi Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	-	Karawang dan Bekasi	<p>perwakilan Biro Hukum sebagai tim enumerator IKK KKP serta pengisian kuesioner oleh:</p> <p>a. dinas perikanan Kota Karawang;</p> <p>b. penyuluh perikanan;</p> <p>c. penerima bantuan pemerintah; dan</p> <p>d. pelaku usaha</p>	





NO.	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
		Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Tahap I (Karawang dan Bekasi)			pakani ikan	
8.	Rabu-Jumat, 4-6 Desember 2024	Kaji Lapang dan Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang Menjadi Populasi Dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Tahap I (Tegal)	-	Tegal	sebagai tim enumerator IKK KKP serta pengisian kuesioner oleh: a. Kepala Bidang Penguatan Daya Saing, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal; b. pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal; c. pengolah hasil perikanan; dan d. pemasar hasil perikanan	
9.	Selasa, 10 Desember 2024	Rapat Pembahasan Data Dukung Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (IKK KKP) Tahun 2025	undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal nomor B.2089/SJ.4/TU.330/X I/2024, tanggal 29 November 2024, hal Undangan Rapat	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor	perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan unit kerja eselon I di lingkungan KKP (BPPSDMKP, BPPMHKP, BHKLN, Pusdatin, dan Biro Hukum)	





IK 3 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP

Tabel 8
Indikator Kinerja 3

SK-1	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum										
IK-2	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100	66,3	100	94,53	100	100	100	100	0	100	100	

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus diselesaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 serta yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian diperoleh dari persentase perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 serta yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain dinyatakan selesai pada saat penyampaian permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan hingga 31 Desember 2024, terdiri atas





- a. Peraturan Menteri dinyatakan selesai apabila telah disampaikan permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM; dan
- b. Keputusan Menteri dinyatakan selesai apabila telah memperoleh penetapan/ditandatangani oleh MKP

Hasil capaian kinerja penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan:

- a. data capaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (TW IV); dan
- b. data capaian Nonprogram Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (TW IV).

diperoleh data sebagai berikut:

	PROGSUN		NONPROGSUN	
	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI
PERMEN KP	25	25	4	4
KEPMEN KP	14	14	21	21
TOTAL	39	39	25	25
PERSENTASE	A = 100%		B = 100%	
	$(A + B) / 2 = 100\%$			

Berdasarkan data tersebut, terdapat total rancangan peraturan perundang-undangan sebagai usulan kinerja peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 64 (enam puluh empat) rancangan Peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 35 (tiga puluh lima) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana keseluruhan rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud telah berhasil diselesaikan, sehingga persentasenya sebesar 100% (seratus persen) untuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan 100% (seratus persen) untuk yang nonprogram penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di





lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024, sehingga persentase capaiannya keseluruhan penyelesaian peraturan perundang-undangan sebesar 100% (seratus persen).

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang bersifat internal, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Walaupun persentase capaian penyelesaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mencapai 100% (seratus persen), namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu dimitigasi, sebagai berikut:

1. melakukan program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan satu tahun sebelumnya;
2. meningkatkan koordinasi melalui rapat pembahasan program penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengirimkan nota dinas/memorandum secara formal;
3. mengoptimalkan peran dan kapasitas pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di setiap unit kerja eselon I dengan melakukan analisis dan evaluasi kebijakan publik di bidang kelautan dan perikanan;
4. memastikan pembentukan mekanisme dan tata cara persetujuan izin prakarsa oleh Menteri;
5. mengadakan bimbingan teknis/pendalaman materi penyusunan produk hukum;
6. lebih banyak mengadakan rapat pembahasan dan fokus grup diskusi dengan unit kerja eselon I terkait;
7. melakukan reviu terhadap usulan program penyusunan produk hukum dari unit kerja eselon I di lingkungan KKP oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum;
8. mengirimkan notulensi hasil rapat kepada unit kerja eselon I terkait;





9. mencantumkan dalam undangan rapat apabila pejabat yang diundang berhalangan hadir maka dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dan pejabat tersebut diberi kewenangan untuk dapat mengambil keputusan dengan dilengkapi surat mandat yang dilampirkan dalam undangan;
10. mengembalikan rancangan produk hukum kepada unit kerja pemrakarsa untuk dibahas kembali di internal;
11. menyampaikan tanggapan tertulis kepada pimpinan unit kerja pemrakarsa terkait dengan materi muatan rancangan yang perlu mendapat klarifikasi;
12. melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait;
13. melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait untuk penyempurnaan hasil harmonisasi;
14. kajian teknis/analisis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan disampaikan dalam rapat pimpinan atau secara tertulis kepada Menteri;
15. koordinasi secara langsung dengan unit kerja eselon I, baik dengan bagian persuratan atau pejabat terkait dalam rangka mengawal proses permohonan paraf dan penandatanganan;
16. mengusulkan rancangan produk hukum yang krusial dibahas dalam rapat pimpinan;
17. melibatkan staf khusus, asisten staf khusus, dan tenaga ahli menteri dalam rapat pembahasan produk hukum; dan
18. koordinasi secara intensif kepada Kementerian Hukum.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan melibatkan Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I, Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II, dan Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III terdiri atas 21 (dua puluh satu) pegawai dengan rincian 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 (empat) orang Pegawai





Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri Sipil (PPNPN), dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pada 2024, untuk mendukung indikator kinerja penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Bagian Perundang-undangan I
 - a. pagu anggaran: Rp1.452.661.000,00
 - b. realisasi anggaran: Rp1.448.744.000,00
2. Bagian Perundang-undangan II
 - a. pagu anggaran: Rp1.545.859.000,00
 - b. realisasi anggaran: Rp Rp1.531.303.039,00
3. Bagian Perundang-undangan III
 - a. pagu anggaran: Rp1.387.703.000,00
 - b. realisasi anggaran: Rp1.385.295.117,00

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dari ketiga Tim Kerja tersebut total pagu anggaran penyusunan peraturan perundang-undangan oleh 3 (tiga) bagian sebesar **Rp4.386.223.000,00**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp4.365.342.156,00**.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR, TANGGAL UNDANGAN, DAN TEMPAT KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
1.	Senin, 1 April 2024	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.583/SJ.4/TU.330/III/2024, tanggal 29 Maret 2024, hal Undangan Rapat, Ruang Rapat Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Pembahasan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Triwulan I	Perwakilan unit organisasi eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	





NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR, TANGGAL UNDANGAN, DAN TEMPAT KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	PESERTA	BUKTI FOTO
2.	Jumat, 28 Juni 2024	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.1090/SJ.4/TU.330/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, hal Undangan Rapat, Ruang Rapat Lantai 15, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Pembahasan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Triwulan II	Perwakilan unit organisasi eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	
3.	Kamis, 3 Oktober 2024	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.1765/SJ.4/TU.330/IX/2024, tanggal 30 September 2024, hal Undangan Rapat, Ruang Rapat Lantai 15, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Pembahasan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Triwulan III	Perwakilan unit organisasi eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	
4.	Senin, 30 Desember 2024	Undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.2191/SJ.4/TU.330/XI/2024, tanggal 24 Desember 2024, hal Undangan Rapat, Aplikasi zoom meeting	Rapat Pembahasan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Triwulan IV	Perwakilan unit organisasi eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	

IK 4 Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

Tabel 9
Indikator Kinerja 4

SK-1 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum										
IK-4 Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	160	100	140	120	-20	100	140

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan dissinkronisasi antara normatif dan kebijakan, bahkan berujung sampai dengan adanya gugatan di lembaga peradilan. Terhadap kondisi tersebut dan meningkatnya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, faktanya berimplikasi





langsung terhadap institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu semakin banyak dan beragamnya permasalahan hukum yang harus dihadapi, antara lain masalah hukum di bidang pertanahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (aset), perizinan usaha perikanan, dan masalah penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Sebagai upaya dan perwujudan dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan efisien, antara lain dalam bentuk telaahan dan kajian dari berbagai aspek, baik dari segi teknis maupun hukum (*legal opinion*) atau bahkan harus dilakukan pembelaan atau advokasi dengan melibatkan unit/instansi terkait lainnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diamanatkan kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal bersama Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi advokasi hukum dan memberikan pelayanan advokasi hukum (pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum) kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif maupun purna tugas.

Konsekuensi logis lahirnya Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak semata-mata hanya fokus pada pemberian pelayanan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum, namun ada pembagian peran “pemberi advokasi hukum” yang juga dinilai penting dan strategis, sehingga suatu keharusan bagi pemberi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang menyeluruh terhadap advokasi hukum baik pada tataran teori maupun praktik.

Tabel inventarisasi Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di yang ditangani





BULAN	PERMASALAHAN HUKUM MELALUI JALUR PENGADILAN/LITIGASI	TOTAL
Januari	Permasalahan Hukum yang mengarah pada Proses Peradilan, dalam proses Peradilan, dan setelah Putusan Pengadilan.	2
Februari		-
Maret		1
April		2
Mei		1
Juni		-
Juli		2
Agustus		1
September		2
Oktober		2
November		1
Desember		2

Permasalahan Hukum yang diselesaikan melalui jalur Pengadilan/Litigasi dalam Realisasi Kinerja tahun 2024 berjumlah 11 (sebelas) Permasalahan dari Target 8 (delapan) permasalahan sehingga capaiannya sebesar 140%. Rincian Permasalahan Hukum melalui jalur Pengadilan/Litigasi:

1. Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/G/2023/PTUN.JKT jo. Putusan Nomor 388/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Maret 2024, yang diajukan oleh Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M (Pegawai/ASN Ditjen Perikanan Budidaya) selaku Pemohon melawan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Termohon, di Mahkamah Agung RI;
2. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT, jo. Putusan Nomor 366/B/2024/PT.TUN.JKT., dari PT Barindo Prima Agung, terhadap Pemutusan Kontrak pada Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Lampulo Aceh, pada Mahkamah Agung RI;
3. Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Rayner Ryadi/Tersangka Tindak Pidana Perikanan selaku Pemohon terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan cq. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan





Perikanan Jakarta selaku Termohon sebagaimana Register Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

4. Gugatan Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLRTR) yang diwakili oleh Fredy Bastian Adrian, DKK., terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor PB-UMKU 912030343223900020002, a.n PT Manado Utara Perkasa;
5. Gugatan Nomor 444/G/LH/2024/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) selaku Penggugat I dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) selaku Penggugat II, terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) a.n PT Manado Utara Perkasa;
6. Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Politeknik KP Dumai pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM, Tahun Anggaran 2017;
7. Penyelidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Asrama Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan pada BPSDMKP Kabupaten Wakatobi T.A 2015, di Kejaksaan Negeri Wakatobi;
8. Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Kluster Tambak Udang di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023;
9. Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa 5 (lima) unit Kapal Viber T.A 2016, di Satreskrimsub POLRES Subang;
10. Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Makanan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone T.A 2023;
11. Pendampingan Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;





Indikator Kinerja Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani merupakan Indikator Kinerja yang bersifat internal, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.

a. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IK

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan nilai sebesar 20 poin, hal ini berdampak positif dikarenakan terdapat penurunan jumlah kasus advokasi pada tahun 2024. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani adalah sebagai berikut

1. inventarisasi seluruh bukti-bukti terkait permasalahan hukum;
2. bedah kasus/gelar perkara dalam rangka tindak lanjut panggilan/pemeriksaan;
3. koordinasi dengan unit kerja terkait, pertemuan koordinasi, briefing calon saksi/tersangka yang akan diperiksa, dan simulasi tanya jawab perkara;
4. koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan penjadwalan yang bisa disepakati para pihak;
5. pendalaman materi baik tugas dan fungsi maupun kasus posisi permasalahan hukum.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani dalam Kelompok Advokasi dan Bantuan Hukum didukung oleh 6 (enam) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp1.043.182.832,00 dari pagu Rp1.075.000.000,00.





c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka dalam ranga mencapai target permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, yaitu

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
1	Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Kapal Inkamina 20 GT, TA.2016, di Polres Subang.	Pada tanggal 1 Oktober 2024 telah dilaksanakan pendampingan dalam penyerahan berkas dan pemeriksaan Saksi.	 <p>Kecamatan Subang, Jawa Barat, Indonesia QR7+PJV, Karanganyar, Kcc. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211, Indonesia Lat: -8.557951° Long: 107.763926° 01/10/24 02:08 PM GMT +07:00</p>
2	Permohonan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.	Pada Sidang Ke-1, tanggal 14 Oktober 2024, Hakim telah membuka Sidang dan Pemohon telah membacakan Permohonannya.	 <p>14 Okt 2024 10:23:29 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>
3		Pada Sidang Ke-2, tanggal 15 Oktober 2024, Termohon membacakan Jawaban.	 <p>15 Okt 2024 11:22:51 6.12648335, 106.85667836E 145 SE No. 4 Jalan R. E. Martadinata, Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta Altitude: 37,1m Speed: 0,0km/h Index number: 159</p>





NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
4		<p>Pada Sidang Ke-3, tanggal 16 Oktober 2024, Hakim Sorat Ria Neva, S.H., M.H., dengan dihadiri pihak Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur.</p>	 <p>16 Okt 2024 10.29.42 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>
5	<p>Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Makanan Taruna Politeknik KP Bone T.A 2023, di Polres Bone, Sulawesi Selatan.</p>	<p>Pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2024 telah dilaksanakan pendampingan terhadap 7 Orang Pegawai Politeknik KP Bone selaku Saksi di Polres Bone, Sulawesi Selatan.</p>	 <p>GPS Map Camera Kecamatan Tanete Riattang Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia Jl. Yos Sudarso No.27, Tjopjong, Kec. Tanete Riattang Tim., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92713, Indonesia Lat: -4.64216° Long: 120.343746° 25/10/24 11:42 AM GMT +07:00</p>
6	<p>Gugatan Nomor 368/G/LH/2024/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.</p>	<p>Pada tanggal 28 Oktober 2024, telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Persiapan Ke-1 (satu) dipimpin oleh Andi Noviandri, S.H., selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili oleh Biro Hukum, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.</p>	
6	<p>Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Politeknik KP Dumai pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM, Tahun Anggaran 2017</p>	<p>Pada tanggal 22 November 2024, telah dilaksanakan pembahasan Pokok Perkara (Legal Audit) dengan melibatkan ahli Hukum Pidana dan dihadiri oleh seluruh pihak terkait.</p>	 <p>GPS Map Camera Kecamatan Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Jl. Medan Merdeka Tim. No.16, Rt.7/rw.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia Lat: -6.178834° Long: 106.834319° 22/11/24 09:27 AM GMT +07:00</p>





NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
7	Gugatan Nomor 444/G/LH/2024/PTUN.JKT. , di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.	Pada tanggal 26 November 2024, telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Persiapan Ke-1 dipimpin oleh Ganda Kurniawan, S.H., selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh pada Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I diwakili oleh Biro Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.	
8	Pendampingan Ahli dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022.	Pada tanggal 18 Desember 2024 telah dilaksanakan pendampingan Ahli di Kejaksaan Negeri Mamuju.	

IK 5 Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

Tabel 10 Indikator Kinerja 5

SK-1	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum									
IK-5	Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani									
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100	100	140	120	20	100	140

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan disinkronisasi antara normatif dan kebijakan, bahkan berujung sampai dengan adanya gugatan di lembaga peradilan. Terhadap kondisi tersebut dan meningkatnya





tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, faktanya berimplikasi langsung terhadap institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu semakin banyak dan beragamnya permasalahan hukum yang harus dihadapi, antara lain masalah hukum di bidang pertanahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (aset), perizinan usaha perikanan, dan masalah penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Sebagai upaya dan perwujudan dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan efisien, antara lain dalam bentuk telaahan dan kajian dari berbagai aspek, baik dari segi teknis maupun hukum (*legal opinion*) atau bahkan harus dilakukan pembelaan atau advokasi dengan melibatkan unit/instansi terkait lainnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diamanatkan kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal bersama Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi advokasi hukum dan memberikan pelayanan advokasi hukum (pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan) kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif maupun purna tugas.

Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi terdiri dari

1. melalui alternatif penyelesaian sengketa;
2. melalui arbitrase;
3. maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia;
4. informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan
5. melalui lembaga nonyudisial lainnya.

Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

1. konsultasi;
2. negosiasi;





3. mediasi;
4. konsiliasi; atau
5. penilaian ahli.

Pemberian Bantuan Hukum melalui arbitrase meliputi

1. pembahasan sengketa;
2. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
3. pembuatan dokumen persidangan;
4. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
5. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di lembaga arbitrase.

Pemberian Bantuan Hukum melalui Ombudsman meliputi:

1. pembahasan laporan atas dugaan maladministrasi;
2. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
3. pembuatan dokumen pemeriksaan;
4. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
5. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan di Ombudsman Republik Indonesia.

Pemberian Bantuan Hukum melalui Komisi Informasi Pusat meliputi:

1. pendampingan dalam pemberian pelayanan informasi publik;
2. pembahasan sengketa;
3. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
4. pembuatan dokumen persidangan;
5. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau f. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.





Pemberian Bantuan melalui lembaga nonyudisial lainnya meliputi:

1. pembahasan pengaduan atau laporan;
2. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
3. pembuatan dokumen pemeriksaan/persidangan;
4. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
5. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan/persidangan di lembaga nonyudisial lainnya.

Berdasarkan praktek yang ada dari beberapa tahun sebelumnya jumlah permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi tidak sebanyak permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi

Adapun tabel inventarisasi Permasalahan Hukum melalui jalur di luar pengadilan/nonlitigasi di yang ditangani

BULAN	PERMASALAHAN HUKUM MELALUI JALUR DILUAR PENGADILAN/NONLITIGASI	TOTAL
Januari	melalui alternatif penyelesaian sengketa;	-
Februari	melalui arbitrase;	1
Maret	maladministrasi melalui Ombudsman Republik	1
April	Indonesia;	-
Mei	informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat	-
Juni	Republik Indonesia; dan	-
Juli	melalui lembaga nonyudisial lainnya.	2
Agustus		1
September		2
Oktober		1
November		1
Desember		2

Permasalahan Hukum yang diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan/nonlitigasi dalam realisasi sampai dengan kinerja TW-IV berjumlah 7 (tujuh) permasalahan dari target 5 (lima) permasalahan dalam satu tahun sehingga capaiannya 140% (seratus empat puluh persen).

Rincian Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi





1. Penyelesaian Sengketa Tanah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung;
2. permintaan penjelasan/klarifikasi laporan masyarakat atas nama Pedagang Hasil Laut Pasar Ikan Modern Jakarta (PHALPIM), berdasarkan undangan Ketua **Ombudsman** Republik Indonesia, Nomor B.2346/LM.24-K3/0950.2024/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024, terkait permasalahan Pengelolaan Pasar Ikan Modern;
3. penyelesaian Penetapan Kerugian Negara a.n Edy Papuyungan berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor R.2424/ITJ/RC/320/VII/2022, dengan nilai Rp476.389.260,00;
4. Pendampingan atas **Somasi/Keberatan Ketua Yayasan WALHI** dan Sekretaris Jenderal KIARA terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada PT Manado Utara Perkasa untuk kegiatan Reklamasi di Pesisir Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara;
5. Pendampingan atas temuan (sementara) BPK terkait pembayaran tunjangan asuransi berupa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan untuk Tenaga Kerja Alih Daya Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Pendampingan atas Surat Terbuka Komponen Aktivistis Nelayan Lobster (Kanal), Forum Koperasi Perikanan Menggugat (FORKOM), Keadailan Nelayan Vietnam-Indonesia (Kanan-Indonesia) dan Persatuan Aksi Nelayan Indonesia (Panelis) terhadap Kebijakan Pengelolaan BBL di Indonesia; dan
7. Pendampingan atas Permohonan Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kapal Perikanan Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di ZEE Australia.

Indikator Kinerja Permasalahan Hukum di Luar Jalur Pengadilan/Nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani merupakan





Indikator Kinerja yang bersifat internal, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.

a. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IK

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan nilai sebesar 40 poin. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani adalah sebagai berikut

1. inventarisasi seluruh bukti-bukti terkait permasalahan hukum;
2. bedah kasus/gelar perkara dalam rangka tindak lanjut panggilan/pemeriksaan;
3. koordinasi dengan unit kerja terkait, pertemuan koordinasi, briefing calon saksi/tersangka yang akan diperiksa, dan simulasi tanya jawab perkara;
4. koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan penjadwalan yang bisa disepakati para pihak;
5. pendalaman materi baik tugas dan fungsi maupun kasus posisi permasalahan hukum.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani dalam Kelompok Advokasi dan Bantuan Hukum didukung oleh 6 (enam) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp480.500.500,00 dari pagu anggaran Rp500.000.000,00.





c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka mencapai target permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani, yaitu

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung.	Pada tanggal 7 Oktober 2024 telah dilaksanakan koordinasi penyelesaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara.	
2.	Penyelesaian Penetapan Kerugian Negara a.n Edy Papyungan berdasarkan Lapoan Hasil Audit (LHA) Nomor R.2424/ITJ/RC/320/VII/202, dengan nilai Rp476.389.260,00;	Pada 19 November 2024 telah dilaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian Negara a.n Edy Papyungan.	
3.	Pendampingan atas Somasi/Keberatan Ketua Yayasan WALHI dan Sekretaris Jenderal KIARA terkait penerbitan PKKPRL PT Manado Utara Perkasa, untuk kegiatan Reklamasi di Pesisir Utara, Kota Manado.	Pada tanggal 8 November telah dilaksanakan pembahasan keberatan WALHI dan KIARA terhadap penerbitan PKKPRL PT Manado Utara Perkasa.	
4.	Pendampingan atas Permohonan Pengenaan Sanksi terhadap Kapal Perikanan Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di ZEE Australia.	Pada tanggal 5 Desember 2024, telah disampaikan Pendapat Hukum terhadap permasalahan tersebut.	





Bulan	Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama	Non Disclosure Agreement	Total
Januari	2	-	-	2
Februari	2	-	-	2
Maret	1	1	-	2
April	2	-	-	2
Mei	1	-	-	1
Juni	1	-	2	3
Juli	-	2	-	2
Agustus	2	-	-	2
September	-	2	-	2
Oktober	2	2	-	4
November	1	1	-	2
Desember	1	3	-	4
Total		28		

2. Rincian penyusunan konsep akhir naskah perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani

No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Keterangan
1.	Kesepakatan Bersama	KKP dan UNPAD	Januari 2024
2.	Kesepakatan Bersama	KKP-Kementan	Januari 2024
3.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Februari 2024
4.	Perjanjian Kerja Sama	Biro Humas dan KLN dengan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret	Februari 2024
5.	Nota Kesepahaman	KKP dan Badan Riset dan Inovasi Nasional	Maret 2024
6.	Perjanjian Kerja Sama	Biro Humas dan KLN dengan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret	Maret 2024
7.	Kesepakatan Bersama	KKP dan Badan Karantina Indonesia (Barantin)	April 2024
8.	Nota	KKP dan Badan Riset dan	April 2024





No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Keterangan
	Kesepahaman	Inovasi Nasional	
9	Nota Kesepahaman	KKP dan Universitas Diponegoro	Mei 2024
10	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen Sumber Daya Air (Kementerian PUPR)	Mei 2024
11	Non-Disclosure Agreement	Pusdatin-PT Telkom Indonesia	Juni 2024
12	Non-Disclosure Agreement	Pusdatin-PT Jala Lintas Media	Juni 2024
13.	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Budi Daya-Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	Juli 2024
14.	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Budi Daya-Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Juli 2024
15.	Nota Kesepahaman	KKP-PT Bank Mandiri (Persero) tbk	Agustus 2024
16.	Nota Kesepahaman	KKP-Kejaksaan RI	Agustus 2024
17.	Perjanjian Kerja Sama	BPPMHKP-BRIN	September 2024
18.	Perjanjian Kerja Sama	BPPMHKP-Dinas KP Provinsi	September 2024
19.	Nota Kesepahaman	KKP-Kejaksaan	Oktober 2024
20.	Nota Kesepahaman	KKP-PLN	Oktober 2024
21.	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen PB- FPIK IPB	Oktober 2024
22.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP-BRI	Oktober 2024
23.	Kesepakatan Bersama	KKP-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	November 2024
24.	Perjanjian Kerja Sama	Biro Humas dan KLN-PT Biznet	November 2024
25.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP-BPH Migas	Desember 2024
26.	Kesepakatan Bersama	KKP-Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan	Desember 2024





No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Keterangan
		Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI)	
27.	Perjanjian Sama Kerja	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi (Biro SDMAO)-Pemerintah Kota Depok	Desember 2024
28.	Perjanjian Sama Kerja	Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP dengan Pusat Pengembangan SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN	Desember 2024

Berdasarkan Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani, terdapat 18 (delapan belas) naskah perjanjian nasional yang telah ditandatangani oleh para pihak, yang terdiri dari

- a. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan KKP Nomor 09/M/HKM.07.01/XI/2024 dan Nomor 18/MEN-KP/KB/XI/2024 tentang Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Perberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Desa dan Daerah Tertinggal;
- b. Nota Kesepahaman antara KKP dan Kejaksaan RI Nomor 17/MEN-KP/NK/X/2024 dan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sinergitas dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- c. Naskah Kesepahaman antara KKP dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 16/MEN-KP/NK/X/2024 dan Nomor DIR.MOU/23.A/2024 tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan;
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian RI dan KKP Nomor 15/MEN-KP/KB/X/2024 dan NK/46/X/2024 tentang Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14/MEN-KP/KB/X/2024 dan 20/KSM/G2/2024 tentang Sinergitas Program Kelautan dan Perikanan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;





- f. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Bakamla Nomor 13/MEN-KP/KB/X/2024 dan Nomor KS.01/15/X/2024 tentang Sinergitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- g. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Barantin Nomor 11/MEN-KP/KB/IV/2024 dan Nomor 3292/HK.220/A/4/2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Nota Kesepahaman antara KKP dan BRIN Nomor 10/MEN-KP/KB/IV/2024 dan Nomor 32/I/KS/04/2024 tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- i. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Unpad 09/MEN-KP/KB/III/2024 dan 152/UN.6.RKT/HK.07.00/2024-MoU tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
- j. Kesepakatan Bersama antara KKP dan PUPR Nomor 08/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 01/PKS/M/2024 tentang Dukungan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan dan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- k. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Kementerian Pertanian Nomor 07/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 01/MoU/HK220/M/02/2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
- l. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Syiah Kuala Nomor 06/MEN-KP/KB/II/2024 dan 43/UN11/HK.02.03/2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi;
- m. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Brawijaya Nomor 05/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 17.1/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi;
- n. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal, KKP dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/SJ/KKP/PKS/XII/2024 dan





- 20.Pj/KS.01/BPH/2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan;
- o. Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Hasanuddin Nomor 04/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 04360/UN4.1/HK.07/2024 tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biro melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
 - p. Nota Kesepahaman antara KKP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 03/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor HK.02/MoU-1/K/D1/2024 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP;
 - q. Nota Kesepahaman antara KKP dan Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 02/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 3/SKB-HK.03.01/II/2024 tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan Serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang; dan
 - r. Nota Kesepahaman antara KKP dan Kemendagri Nomor 01/MEN-KP/KB/II/2024 dan Nomor 500.5.1/653/SJ tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani merupakan Indikator Kinerja yang bersifat internal, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.

a. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IK

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat peningkatan kinerja sebesar 12,64 poin. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani adalah sebagai berikut

- 1. Mengikuti tahapan pelaksanaan dari pembuatan suatu naskah perjanjian nasional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang





Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP, sebagai berikut

- 1) pelaksanaan inisiasi kerja sama antara pihak mitra dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);
- 2) inisiasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan pembahasan dengan memperhatikan kriteria calon mitra kerja sama antara lain
 - a) adanya kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kementerian;
 - b) memiliki kegiatan sejenis yang dapat dilakukan dengan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) dukungan sumber daya manusia yang memadai;
 - d) kepemilikan sarana dan prasarana; dan
 - e) teknologi.
2. apabila telah dilakukan inisiasi kerja sama dan pembahasan terkait rencana kerja sama yang dilakukan, Biro Perencanaan selaku unit kerja sama antarlembaga di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirimkan memorandum kepada Biro Hukum dalam rangka permohonan untuk melakukan penyempurnaan dan finalisasi terhadap draf naskah perjanjian nasional;
3. dalam hal Kerja Sama ditindaklanjuti dalam bentuk pembuatan naskah perjanjian nasional, Biro Hukum melakukan telaah dan analisis terhadap draf naskah perjanjian nasional dan melakukan penyiapan konsep akhir draf naskah perjanjian nasional; dan





4. telaah yang dilakukan oleh Biro Hukum dilakukan dengan memperhatikan sistematika dan format naskah Perjanjian, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani dalam Kelompok Perjanjian dan Hukum Internasional didukung oleh 4 (empat) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp276.770.477,00 dari total pagu anggaran senilai Rp277.284.000,00.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani adalah sebagai berikut

- a. pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan koordinasi pembahasan Kesepakatan Bersama antara KKP dan UNPAD di ruang rapat Bersama 2 Livin, Lantai 2, Gedung Rektorat UNPAD yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan dihadiri oleh perwakilan UNPAD (Wakil Dekan I dan II FPIK, Kepala Departemen Kelautan, Ketua Program Studi Magister Konservasi Laut, Ketua Program Studi Wisata Bahari, Sekretaris Program Studi Ilmu Kelautan, Sekretaris Program Studi Ilmu Perikanan, dan Manajer Fakultas Hukum) dan KKP (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PKPRL, BP2MHKP, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);





- b. pada tanggal 5 Maret 2024, telah diselenggarakan pembahasan draf Kesepakatan Bersama yang dilakukan di hotel Artotel Yogyakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan dihadiri oleh Asisten Khusus Menteri KP Bidang Publikasi Penangkapan Ikan Terukur, perwakilan dari Perusahaan Perikanan Tangkap (PT Samudera Indo Sejahtera Tual, PT Industri Perikanan Arafura Kepulauan Aru), pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, pelaku usaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan Kabupaten Pati Jawa Tengah, Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan dari pemerintah daerah Kota Tual, perwakilan dari KKP (Ditjen PT, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP, BP2SDMKP, dan Biro Hukum)



- c. pada tanggal 6 Maret 2024, telah diselenggarakan penandatanganan Kesepakatan Bersama di Hotel Temtrem Yogyakarta antara Ditjen Perikanan Tangkap dengan beberapa perusahaan di bidang perikanan tentang Kerja Sama Bisnis Perikanan Tangkap, dengan ruang lingkup meliputi:
- 1) optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 2) kerja sama hulu-hilir bisnis perikanan tangkap;
 - 3) hilirisasi dan pemasaran produk perikanan;
 - 4) pencegahan penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan; dan
 - 5) menjalin kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK;





- d. pada tanggal 14 Maret 2024, telah diselenggarakan pembahasan draf Nota Kesepahaman antara KKP dan BRIN di Swiss-Belhotel Bogor dan menggunakan aplikasi *zoom meeting* yang dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di Biro Hukum dan dihadiri oleh Sekretaris Deputi bidang SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BRIN) dan dihadiri oleh perwakilan BRIN dan KKP (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, BP2SDMKP, BP2MHKP, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan BMN, Biro SDMAO, Biro Humas dan KLN, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusdatin, dan Biro Hukum);



- e. pada tanggal 27 Maret 2024, telah diselenggarakan koordinasi pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Pusdatin dan Setda Provinsi Jawa Tengah di ruang rapat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting* yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah) dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Jateng (Dinas Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama) dan KKP (Pusdatin, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);





- f. pada tanggal 9 Agustus 2024, telah diselenggarakan rapat pembahasan draf Nota Kesepahaman antara KKP dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.1394/SJ.4/TU.330/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, hal Undangan Pembahasan draf Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang dipimpin oleh Ketua Tim Perjanjian dan Hukum Internasional (Biro Hukum) dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Bank Mandiri (*Senior Vice President, Assistant Vice President, Branch Manager, Relationship Manager, dan Officer Retail Funding & Solution*) dan KKP (Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PDSPKP, Itjen, BPPSDM, Biro Keuangan, Biro Umum & PBJ, Pusdatin, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum); dan



- g. pada tanggal 22 Agustus 2024, telah dilakukan kaji lapang dalam rangka penyusunan konsep *Non-Disclosure Agreement* antara Pusdatin dengan Mitra di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Surabaya) dan dihadiri oleh Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M dan perwakilan dari Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan surat tugas Kepala Biro Hukum, nomor B.1514/SJ.4/KP.440/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024.





IK 7 Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum

Tabel 12
Indikator Kinerja 7

SK-1	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum									
IK-7	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum									
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	120	100	116,67	116,67	-3,33	100	116,67

Dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kerja sama dan apabila diperlukan membuat perjanjian internasional dalam rangka mendukung program prioritas yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pembuatan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan membuat perjanjian dengan pihak lain yang bersifat publik dengan negara lain maupun organisasi internasional. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama dan penyusunan perjanjian, serta perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan presentase perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum s.d triwulan IV, terdapat empat belas (14) dari target dua belas (12) konsep naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum, dalam hal ini antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional, sehingga capaian kinerja sebesar 116,67%. Berikut merupakan rincian konsep naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum, yaitu





No	Konsep naskah perjanjian	Para Pihak	Keterangan
1.	Amandemen Perjanjian Hibah Luar Negeri <i>Global Environment Facility-6 Coastal Fisheries Initiative</i> Indonesia (GEF 6 CFI)	KKP dengan WWF US	Bulan Januari 2024
2.	<i>Memorandum of Understanding Kerja Sama Perikanan dan Budidaya</i> Indonesia-Hongaria	KKP dan <i>the Ministry of Agriculture of Hungary</i>	Bulan Februari 2024
3.	<i>Implementing Arrangement on Cooperation in Developing Sustainable Fisheries and Aquaculture</i>	KKP dan <i>the People's Committee of Phu Yen Province of the Socialist Republic of Viet Nam</i>	Bulan Februari 2024
4.	Proposal dan perjanjian hibah luar negeri Proyek <i>Blue HaloS-Blue Ecosystem Adaptation Mechanism</i>	KKP dengan <i>Conservation International</i>	Bulan April 2024
5.	<i>Coral Reef Conservation Agreement</i> di bawah kerangka <i>Tropical Forest Conservation Act</i>	KKP (Ditjen PKRL) dan <i>swap partners</i> yang terdiri atas The National Conservancy, Conservation International, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia	Bulan April 2024
6.	Deklarasi Menteri untuk Kerja Sama Regional di Kawasan Laut Arafura dan Timor	Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Papua Nugini, Pemerintah Timor Leste, dan Pemerintah Australia	Bulan April 2024
7.	<i>Mutual Recognition Agreement on the Personnel Certification of Fishing Vessels</i>	Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal	Bulan Juli 2024
8.	<i>Memorandum of Understanding on Fisheries and Aquaculture Cooperation</i>	KKP dan <i>The Minister for Fisheries and Haliuetic Productions of the</i>	Bulan Juli 2024





No	Konsep naskah perjanjian	Para Pihak	Keterangan
		<i>People's Democratic Republic of Algeria</i>	
9.	<i>Draft Host Country Agreement 6th International MSPforum</i>	KKP dengan UNESCO	Bulan Agustus 2024
10.	<i>Memorandum of Understanding on Quality and Safety Assurance of Fish and Fishery Product</i>	KKP dan Directorate General of Fisheries Administration the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of the Kingdom of Cambodia	Bulan September 2024
11.	<i>Technical Cooperation Arrangement</i>	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan <i>Fujian Institute for Sustainable Oceans</i> , Republik Rakyat Tiongkok	Bulan September 2024
12.	<i>Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation</i>	KKP dan <i>Lakes and Fish Resources Protection and Development Agency of the Arab Republic of Egypt</i>	Bulan Oktober 2024
13.	<i>Memorandum of Understanding on Fisheries and Aquaculture Cooperation</i>	Pemerintah Indonesia dan Turkiye	Bulan Oktober 2024
14.	<i>Implementing Arrangement</i>	<i>Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Huanyu International Education Corp</i>	Bulan November 2024

Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum terdapat beberapa dokumentasi kerja sama yang telah tertindaklanjuti, yang terdiri dari

1. *Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation*, periode masa berlaku 13 Januari 2024 - 13 Januari 2027; dan





2. *Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation*, periode masa berlaku ditandatangani 1 Maret 2017 berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama.

Indikator Kinerja Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum merupakan Indikator Kinerja yang bersifat internal, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.

a. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IK

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan kinerja sebesar 3,33 poin, namun bila disandingkan dengan jumlah draft perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum 2024 sebanyak 14 draf dan tahun 2023 sebanyak 12, dapat diartikan bahwa tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya Indikator kinerja perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum adalah sebagai berikut

1. melakukan rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan dan/atau Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dimana pada rapat pembahasan tersebut juga mengundang unit kerja eselon I di KKP atau kementerian/lembaga lain untuk mengakomodasi masukan terkait permohonan audiensi kerja sama yang berasal dari pihak mitra;
2. melakukan rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan/atau unit kerja eselon I untuk menindaklanjuti pembahasan awal yang telah dilakukan dengan mengundang pihak mitra pengusul kerja sama tersebut. Pada rapat tersebut dilakukan penyamaan persepsi antara pihak mitra dengan KKP terkait tujuan kerja sama, tanggung jawab masing-masing pihak, dan ketentuan lain yang perlu diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan





3. melakukan pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait diantaranya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, atau Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait dengan posisi Indonesia dalam perundingan atau perjanjian internasional yang sedang dalam tahapan negosiasi.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang telah diberikan pertimbangan hukum, dalam Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional didukung oleh 4 (empat) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran perjanjian internasional dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan Rp1.150.986.670,00 dari pagu anggaran Rp1.155.758.000,00.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang telah diberikan pertimbangan hukum

- a. Pertemuan *The Third Internasional Mini Conference on Developing IORA Guidelines on Combating, Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* yang dilaksanakan pada tanggal 30 September-4 Oktober 2024, di Pullman Legian Beach, Bali, yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dari Ditjen PSDKP, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri;





- b. Pertemuan *Regional Workshop on Opportunities and Challenges in Economic and Post-Harvest Issues Related to Market Access for Fisheries and Aquaculture Products* yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 Oktober 2024, di Padma Resort Legian Bali yang dibuka oleh Dirjen Perikanan Tangkap dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota FAO di Kawasan Asia dan Pasifik, antara lain Bangladesh, China, India, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam, Indonesia dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan KKP (Setjen, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);



- c. Pertemuan *the Extended Commission of the 33rd Annual Meeting of the Commission (EC 31) Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Oktober 2024 di Regent Taipei Hotel, delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Riset Perikanan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum, Institut Pertanian Bogor



- d. Pertemuan Finalisasi *Technical Cooperation Guidelines to Promote Sustainable Capture Fisheries* antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dilaksanakan pada tanggal 15-16 Oktober 2024 yang dihadiri perwakilan delegasi kedua negara, RRT diwakili oleh Deputy *Director General, Bureau of Fisheries, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs*, sedangkan Indonesia diwakili oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, dan KKP





(Dirjen Perikanan Tangkap, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktur Pemberdayaan Usaha, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, perwakilan Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Biro Hukum);



- e. Rapat Pembahasan *Compiled Draft Text International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution including in the Marine Environment* pada tanggal 22 Oktober 2024 di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan KKP (Bapak Nilanto Perbowo selaku Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama, perwakilan dari Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Dit. Rumpuk Laut, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)



- f. Pertemuan Masterclass Law of The Sea/Hukum Laut yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 November 2024, di Canberra, Australia, yang dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum





- g. Pertemuan *Indonesia Coral Bond Project: Appraisal Mission* yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2024, di Hotel Aryaduta, yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Data, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, *World Bank*, *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, dan KKP (Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);



- h. Rapat Persiapan Tindak Lanjut Adopsi Persetujuan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, di Ruang Rapat Biro Hukum, yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan KKP (Dit. Perencanaan Ruang Laut, Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, dan Biro Hukum);



- i. *General Council World Trade Organization* di Jenewa, Swiss yang dilaksanakan pada tanggal 18-24 Juli 2024 dengan delegasi Indonesia yang diwakili oleh Ditjen Perikanan Tangkap, Biro Hukum, dan Perwakilan Tetap RI di Jenewa





- j. *Workshop Drafting Effective Legislation in Compliance with UNCLOS* yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 Desember 2024 yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip UNCLOS dan implementasinya di tingkat nasional, dengan pendekatan praktis melalui diskusi, paparan ahli, dan latihan penyusunan legislasi. Sebanyak 32 peserta hadir dari berbagai kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola kelautan dan hukum di negara-negara ASEAN dan Timor Leste



- k. *Workshop for North-East and South-East Asia on the BBNJ Agreement* oleh *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea PBB* yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 September 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Perjanjian BBNJ termasuk: latar belakang Perjanjian BBNJ; implikasi menjadi negara pihak pada Perjanjian BBNJ; hak dan kewajiban negara pihak; instrumen dan kerangka hukum yang relevan serta kerja sama dengan *global, regional, subregional and sectoral bodies* terkait; dan langkah-langkah prosedural untuk menjadi negara pihak.





IK 8 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 13
Indikator Kinerja 8

SK-1 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum										
IK-8 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	80	89	98	92	99	107,61	1	92	99

Penyediaan informasi publik secara akurat, benar, lengkap, dan tidak menyesatkan merupakan salah satu tugas badan pemerintahan sebagai instansi pelayanan masyarakat. JDIH KKP senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, serta meningkatkan pemberian pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk memberi dukungan teknis bagi organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (JDIH KKP) berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 telah dibentuk tim teknis pengelola JDIH KKP dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/SJ Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tim Teknis JDIH KKP) terdiri atas

1. Pengarah: Sekretaris Jenderal;
2. Penanggung Jawab: Kepala Biro Hukum;





3. Ketua Pelaksana: Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III; dan
4. Anggota Pelaksana terdiri dari pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Arsiparis, dan Pustakawan.



Gambar 5
Tim Teknis JDIH

Guna penyediaan layanan informasi dan dokumentasi hukum bidang kelautan dan perikanan yang lengkap, akurat, mudah, dan dapat diakses setiap waktu, Biro Hukum telah mengembangkan sistem informasi yang mana dapat diakses secara umum melalui *website* JDIH KKP dengan domain <https://jdih.kkp.go.id/> dan selalu diperbaharui secara berkala. *Website* JDIH KKP telah **terintegrasi dengan portal <https://jdihn.go.id/> sejak 31 Juli 2017**. Selain itu, segala bentuk dokumen dan informasi tersebut juga dapat dilihat secara non-elektronik melalui buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Indikator Kinerja yang bersifat eksternal, sehingga dapat dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun





2023, JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian.

HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023

KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100
2.	Kementerian Sosial	99
3.	Kementerian Ketenagakerjaan	99
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	99
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99

Gambar 6
Hasil Penilaian Pengelolaan JDIH Tahun 2024

a. Analisis Penyebab Keberhasilan dalam Rangka Peningkatan

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 1 poin. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IK Kinerja Pengelolaan JDIH KKP, antara lain

1. rapat koordinasi JDIH KKP pada tanggal 23 Januari 2024 di Hotel Ibis Style Pajajaran Bogor;





2. asistensi penyusunan abstrak peraturan menteri dan pengolahan produk hukum unit kerja eselon I pada *website* JDIH KKP pada tanggal 29 Februari 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV;
3. asistensi penyusunan abstrak peraturan menteri dan pengolahan produk hukum unit kerja eselon I pada *website* JDIH KKP pada tanggal 27 Maret 2024 di Swiss-bell Hotel Bogor;



4. konsultasi dan koordinasi ke Pusat JDIH Nasional pada tanggal 22 April 2024 di Ruang Ruang Rapat Hardjito, Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional;



5. rapat rencana aksi JDIH KKP pada tanggal 30 April 2025 di Hotel Luminor Padjadjaran Bogor;





6. rapat pengembangan website JDIH KKP pada tanggal 29 Mei 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV;
7. menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola JDIH yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 25 Juni 2024 secara daring;
8. studi banding pengelolaan JDIH dengan JDIH Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 1 Juli 2024 di Ruang Rapat Dewan Pakar BPIP Lantai 3 Gedung Setwapres;



9. studi banding pengelolaan JDIH dengan JDIH Kota Bandung pada tanggal 3 Juli 2024 di Ruang Rapat Bagian Hukum Lantai 3 Gedung Timur Sekretariat Kota Bandung;





10. menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola JDIH yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 4 Juli 2024 secara daring;
11. konsultasi ITSA website JDIH KKP dengan Badan Sandi dan Siber Nasional pada tanggal 5 Juli 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV;



12. rapat monitoring dan evaluasi JDIH KKP pada tanggal 9 Juli 2024 di Swiss-bell Hotel Bogor;



13. menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi JDIH Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan 7 Kementerian/Lembaga Koordinasi





Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 22 Juli 2024 di DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya;



14. menerima kunjungan JDIH Kementerian Perdagangan ke JDIH KKP pada tanggal 24 Juli 2024 di Ruang Rapat Perpustakaan Lantai 2 Gedung Mina Bahari IV;



15. internalisasi JDIH KKP ke UPT dan kuliah umum JDIH pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2024 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana;





16. menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola JDIH yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 7 Agustus 2024 secara daring;
17. menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta;



18. forum konsultasi publik pelayanan JDIH KKP pada tanggal 10 September 2024 di Auditorium Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV;



19. studi banding pengelolaan JDIH dengan JDIH Provinsi Banten pada tanggal 11 September 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten;





20. menerima kunjungan JDIH Badan Riset dan Inovasi ke JDIH KKP pada tanggal 30 September 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV;



21. studi banding pengelolaan JDIH dengan JDIH Kota Semarang pada tanggal 3 Oktober 2024 di Ruang Kepala Bagian Hukum, Lantai 2 Gedung Moch. Ichsan Sekretariat Daerah Kota Semarang;



22. menghadiri Rapat Evaluasi Kinerja JDIH Marves dan 7 K/L Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 10 Oktober 2024;





23. studi banding pengelolaan JDIH dengan JDIH Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tanggal 5 November 2024 di Ruang Rapat Legislasi, Lantai 2 Gedung Balaikota DKI Jakarta;



24. menghadiri Sosialisasi Indikator Penilaian dan e-Report JDIH yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 November 2024 secara daring;

25. studi banding pengelolaan JDIH dengan JDIH Kabupaten Magelang pada tanggal 29 November 2024 di Ruang Perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang;



26. menerima kunjungan JDIH Badan Pusat Statistik ke JDIH KKP pada tanggal 11 Desember 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 14 Gedung Mina Bahari IV; dan





27. Asistensi Pelaporan Kinerja Pengelolaan JDIH KKP Tahun 2024 Melalui Aplikasi e-Report pada tanggal 19 Desember 2024 di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV.

b. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan didukung oleh 6 (enam) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp660.081.064,00 dari total pagu anggaran senilai Rp700.000.000,00.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian dan mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.





IK 9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum

Tabel 13
Indikator Kinerja 9

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum									
IK-9	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan									
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	87,6	84	88,50	105,36	0,9	84	88,50

Nilai PM SAKIP Biro Hukum merupakan IK yang menggantikan IK Nilai Rekoneiliasi Kinerja. Adapun IK ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

- perencanaan kinerja (30%),
- pengukuran kinerja (30%),
- pelaporan kinerja (15%),
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP Setjen adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di Biro Hukum dengan kategori penilaian sebagai berikut

Tabel 15
Kategori Penilaian PM SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan penilaian di tahun 2024, Nilai PM SAKIP Biro Hukum mencapai 88,50 87.60 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.1253/SJ/RC.610/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, hal





Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024. Adapun rincian penilaian pada setiap biro adalah sebagai berikut

Tabel 16
Hasil PM SAKIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Eselon II	Nilai
Biro Hukum	88,50
Biro Perencanaan	87,70
Biro Humas dan KLN	85,80
Biro Umum dan PBJ	85,50
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85,20
Biro Keuangan dan BMN	84,55
Pusat Data, Statistik, dan Informasi	84,55
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	82,20
BLU LPMUKP	81,50

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat peningkatan penilaian sebesar 0,9 dan capaian Biro Hukum merupakan capaian peringkat ke-1 di lingkup Sekretariat Jenderal. Adapun capaian ini diperoleh dengan adanya:

1. adanya upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria pengukuran kinerja yaitu telah disusun dashboard capaian kinerja Biro Hukum yang dapat diakses melalui tautan <https://sites.google.com/view/simanjabirohukum/beranda>.





PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA



2. Perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi.
3. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
4. Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan.
6. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja.
7. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja.
8. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Dalam menunjang capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum didukung oleh seluruh perwakilan dari tim kerja. Untuk dapat melaksanakan





kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp85.546.800,00 dari total pagu anggaran senilai Rp85.547.000,00.

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum

Tabel 17
Indikator Kinerja 10

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum										
IK-10	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
63,72	72,56	82,03	84,03	89,64	85	90,18	106,09	0,54	85	90,18	

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Biro Hukum yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Berdasarkan memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor B.62/SJ.3/TU.140/I/2024, tanggal 09 Januari 2024, hal Capaian Indikator Kinerja IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *Dashboard* IP ASN KKP yang berbasis data





Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu 90,18 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,74, Kompetensi 34,47, Kinerja 28,97, dan Disiplin 5.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat peningkatan capaian sebesar 0,54. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Biro Hukum untuk mencapai target, yaitu

1. Menginventarisasi data kepegawaian di lingkungan Biro Hukum;
2. Mengadakan pendalaman materi untuk seluruh pegawai; dan
3. Memonitoring dan mengevaluasi penilaian prestasi kerja pegawai;

Tabel 18
Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2025
per Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	12,5	30	5	72,5
2	Biro Perencanaan	21,84	33,5	26,63	5	86,97
3	Biro Keuangan	21,1	35,96	26,54	5	88,59
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,9	37,39	26,47	5	89,76
5	Biro Hukum	21,74	34,47	28,97	5	90,18
6	Biro HKLN	21,43	32,01	27,14	5	85,58
7	Biro Umum dan PBJ	20,72	36,92	25,19	5	87,83
8	Pusdatin	21,17	35,63	28,33	5	90,13
9	BPISKP	22,75	39,17	25	5	91,92
	Total	21,85	33,06	27,14	5	87,05 (Tinggi)

Dalam menunjang capaian Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2024 per Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal didukung oleh seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp26.202.279,00 dari total pagu anggaran senilai Rp26.350.000,00.





IK 11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum

Tabel 19
Indikator Kinerja 11

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum									
IK-11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum									
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	100	100	100	100	101	101	-	100	101

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro Hukum merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Melalui memorandum Kepala Biro Keuangan, Nomor 3626/SJ.2/RC.610/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, hal Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023”, Biro Hukum mendapatkan nilai 101%, dapat diartikan **bahwa tidak ada temuan BPK** di Biro Hukum.

Tabel 20

Rincian Realisasi IK
“Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Setjen”

No	Eselon II	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100
2.	Biro Keuangan dan BMN	0	0	100
3.	Biro Hukum	0	0	100
4.	Biro Umum dan PBJ	16	16	100
5.	Biro SDMAO	0	0	100
6.	Biro HKLN	0	0	100
7.	Pusdatin	1	1	100
8.	LPMUKP	0	0	100





No	Eselon II	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
9.	BPISDKP	0	0	100
10.	Satker Dekonsentrasi	0	0	100
11.	SETJEN	17	17	100

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat penurunan capaian, dapat diartikan bahwa Biro Hukum konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu untuk memitigasi adanya temuan, Biro Hukum memiliki metode penyelenggaraan SPIP melalui portal informasi SPIP dengan alamat tautan lynk.id/spiprokum. Dengan adanya sistem satu pintu tersebut, proses penyelenggaraan SPIP dapat terintegrasi melalui satu pintu. Hal tersebut meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pengendalian risiko yang terjadi di setiap triwulannya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terkontrol dengan baik, hal ini dapat menjadi evaluasi tersendiri bagi Biro Hukum agar senantiasa terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target atas proses bisnis yang dijalani.

Dalam menunjang capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum oleh seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 19.922.000,00 dari total pagu anggaran senilai Rp19.982.000,00.





IK 12 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum

Tabel 21
Indikator Kinerja 12

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IK-12 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum											
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
83,33	94,64	94,64	100	133,33	94	133,33	120	0	94	133,33	

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain

1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Berdasarkan memorandum Kepala Pusat, Data, Statistik dan Informasi Nomor 32/SJ.7/TU.210/I/2024, tanggal 3 Januari 2024, Hal Capaian Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023, Biro Hukum mendapatkan **nilai capaian 133,33**.





Tabel 22
Grafik Target dan Realisasi IK
Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024

No.	Eselon II	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1.	Biro Perencanaan	94,00	133,33	141,84
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	94,00	133,33	141,84
3.	Biro Hukum	94,00	133,33	141,84
4.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	94,00	100,00	106,38
5.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	94,00	100,00	106,38
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	94,00	133,33	141,84
7.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	94,00	133,33	141,84
8.	LPMUKP	94,00	133,33	141,84
	Sekretariat Jenderal	94,00	125,00	132,98

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, nilai yang diperoleh Biro Hukum terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya telah dilakukan oleh Biro Hukum untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum yaitu mengingatkan kepada seluruh pegawai Biro Hukum melalui briefing pagi atau *whatsapp group* untuk selalu menginput seluruh aktivitas keseharian pegawai pada laman <https://portal.kkp.go.id/> agar Biro Hukum dapat menjadi *center of excellent* yang terefleksikan dalam penilaian-penilaian yang selama ini dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun instansi lain.

IK 13 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum

Tabel 23
Indikator Kinerja 13

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum										
IK-13	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100	45	100	100	100	95	100	105,26	-	95	100	

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, reuiu, dan





evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025, tanggal 8 Januari 2025, hal Capaian Indikator Kinerja Utama Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi atau tindak lanjut yang perlu diselesaikan oleh Biro Hukum, sehingga nilai capaian Biro Hukum mencapai 100%.

Tabel 24
Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2024

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	36	36	-	-	100%	0
3.	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4.	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5.	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6.	Biro HKLN	18	18	-	-	100%	0
7.	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8.	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9.	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
SETJEN		196	196	120.551.753	120.551.753	100%	0

Bila membanding capaian dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian pada tahun 2020, penurunan ini terjadi dikarenakan terdapat kendala penyelesaian dikarenakan covid-19. Namun capaian kembali meningkat dan tidak terdapat penurunan dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Upaya yang dilakukan untuk tercapainya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum adalah

- a. Segera menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal tepat waktu;
- b. Berdiskusi Bersama Tim SPIP untuk penjaminan kualitas atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan; dan





c. Monitoring dan evaluasi kegiatan Biro Hukum dan anggaran secara berkala.

Dalam menunjang capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum oleh perwakilan Tim Kerja SPIP dan seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.670.000,00 dari total pagu anggaran senilai Rp2.700.000,00.

IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum

Tabel 25
Indikator Kinerja 13

SK-2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum										
IK-14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	99,31	95	99,72	104,97	0,41	92	99,72

Dalam menunjang tugas dan fungsi yang dimandakan kepada Biro Hukum, diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun satu tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut

Tabel 26
Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum

Layanan	Pagu	Target Realisasi	%	Realisasi	%	Sisa
Layanan Hukum	Rp6.669.051.000	Rp6.647.043.000	99,66	Rp4.209.037.295	99,66	Rp14.301.705
Layanan Bantuan Hukum	Rp427.169.000	Rp426.101.000	99,75	Rp426.977.609	99,96	Rp191.391





Layanan	Pagu	Target Realisasi	%	Realisasi	%	Sisa
Layanan Umum	Rp3.257.780.000	Rp3.221.944.000	98,89	Rp3.249.916.284	99,76	Rp7.863.716
Layanan Perkantoran	Rp2.094.837.000	Rp2.085.619.000	99,55	Rp2.093.551.511	99,94	Rp1.285.489
JUMLAH	Rp12.448.837.000	Rp12.380.707.000	99,45	Rp12.413.394.401	99,72	Rp35.442.599

Presentasi realisasi anggaran Biro Hukum pada aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,72%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Biro Hukum dalam melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya *output* yang direncanakan pada saat penganggaran. Selain itu, atas tercapainya presentasi realisasi anggaran tersebut, Pada tahun 2024, pagu anggaran Biro Hukum sebesar Rp16.217.199.000, namun mendapat blokir 2 kali Automatic Adjustment (AA) dan pengurangan pagu untuk diserahkan ke Biro Umum dan PBJ yaitu Rp3.768.362.000. Sehingga pagu akhir Biro Hukum sebesar Rp12.448.837.000.

Tabel 27
Capaian Realisasi Anggaran
Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024

UNIT ESELON II	PAGU	TOTAL BLOKIR	PAGU EFEKTIF	SP2D			AKRUAL		
				REALISASI	SISA DANA	%	REALISASI	SISA DANA	%
BIRO PERENCANAAN	279,952,553,000	13,087,980,000	266,864,573,000	211,633,656,021	55,230,916,979	79.30%	213,234,049,169	53,630,523,831	79.90%
BIRO KEUANGAN DAN BMN	17,059,764,000	4,421,933,000	12,637,831,000	11,972,924,432	664,906,568	94.74%	12,564,849,648	72,981,352	99.42%
BIRO SDMAO	18,226,231,000	3,757,541,000	14,468,690,000	12,367,920,550	2,100,769,450	85.48%	14,055,714,493	412,975,507	97.15%
BIRO HUKUM	16,033,356,000	3,584,519,000	12,448,837,000	12,032,374,432	416,462,568	96.65%	12,413,394,401	35,442,599	99.72%
BIRO HUMAS DAN KLN	35,157,883,000	7,140,919,000	28,016,964,000	24,818,051,894	3,198,912,106	88.58%	27,746,287,875	270,676,125	99.03%
BIRO UMUM DAN PBJ	332,849,012,000	6,039,819,000	326,809,193,000	320,177,268,971	6,631,924,029	97.97%	326,170,945,579	638,247,421	99.80%
PUSDATIN	121,680,988,000	13,516,240,000	108,164,748,000	105,963,838,502	2,200,909,498	97.97%	107,594,767,326	569,980,674	99.47%
TOTAL	820,959,787,000	51,548,951,000	769,410,836,000	698,966,034,802	70,444,801,198	90.84%	713,780,008,491	55,630,827,509	92.77%

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat kenaikan capaian sebesar 0,41%. Upaya yang dilakukan untuk tercapainya Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum adalah

- a. Menampilkan target dan realisasi anggaran tahun 2024 pada saat Apel Pagi dan Doa Pagi yang dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu agar seluruh tim kerja di lingkungan Biro Hukum dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang sudah ditentukan;





- b. Rekonsiliasi keuangan dilaksanakan setaip awal bulan antara Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Pemegang Uang Muka Kerja, bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi keuangan telah berjalan baik; dan
- c. Dillaksanakan kas opname pada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan saldo buku kas umum dan fisik sudah sesuai dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Monitoring dan evaluasi kegiatan Biro Hukum dan anggaran secara berkala. Dalam menunjang capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Pemegang Uang Muka Kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 19.932.500,00 dari total pagu anggaran senilai Rp 20.055.000,00.

IK 15 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP

Tabel 28
Indikator Kinerja 15

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum								
IK-15		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP								
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100

Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk untuk rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Penyusunan Keputusan Menteri dimaksud





merupakan rutinitas tahunan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait, Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025, tanggal 4 Januari 2025, hal Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab Biro Hukum dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yaitu 1 (satu) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 telah tercapai, sehingga persentase penyelesaian sebesar 100% (seratus persen), dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tidak terdapat peningkatan dan penurunan yaitu tetap 100% (seratus persen). Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai capaian kinerja, yaitu:

BULAN	RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG REGULASI	TOTAL
Oktober–Desember	1	1

Sebagai upaya penyelesaian dan pencapaian target penyelesaian Peraturan/Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Biro Hukum telah menyampaikan memorandum atau nota dinas Kepala Biro Hukum kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait di





BULAN	RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG REGULASI	TOTAL
	<p>lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang intinya mengingatkan kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait dimaksud agar dapat menyampaikan rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024, khususnya rancangan Peraturan/Keputusan Menteri yang menjadi target penyampaian di TW IV, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memorandum Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor 2235/SJ.4/HK.160/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;2. memorandum Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor 2577/SJ.4/HK.160/XI/2024, tanggal 4 November 2024;3. memorandum Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor 2864/SJ.4/HK.160/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024; dan4. nota dinas Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 2926/SJ.4/HK.160/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024. <p>Selain itu, telah diselenggarakan rapat evaluasi program penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 TW IV pada tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.2191/SJ.4/TU.330/XI/2024, tanggal 24 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 dan telah disampaikan Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3140/SJ.4/ HK.160/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024, guna menyampaikan hasil evaluasi program penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 TW IV dimaksud.</p>	

Dalam menunjang capaian persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 serta untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024 sebesar Rp1.452.661.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan





realisasi anggaran sebesar Rp1.448.663.744,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat, dengan persentase sebesar 99,72% (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) persen.

IK 16 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum

Tabel 29
Indikator Kinerja 16

SK-2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum										
IK-15 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP										
Realisasi					Realisasi Tahun 2024				Renstra Setjen 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	75	88,75	118,33	-	75	88,75

Biro Hukum merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal yang telah diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Biro Hukum tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Biro Hukum telah melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan lembar kerja terhadap pembangunan Zona Integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk.

Telah dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai di Lingkungan Sekretariat Jenderal, berdasarkan hasil penilaian, Biro Hukum mendapatkan nilai 88,75 dengan keterangan memenuhi syarat. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun





sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari komitmen dan kerja sama Kepala Biro Hukum beserta seluruh pegawai yang terlibat. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp187.039.673,00 dari total pagu anggaran senilai Rp187.574.000,00.

3.2. Kinerja Anggaran

Menyoroti penerapanan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini dimana fokus Pemerintah adalah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi dibidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengkaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau *output* dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauhmana “manfaat/hasil (*outcome*)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan Hukum. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target dengan data yg digunakan meliputi

- Data capaian Nilai Kinerja Organisasi Biro Hukum pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran Biro Hukum





Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi penggunaan sumber daya di Lingkungan Biro Hukum sebesar 99% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NKO	Pagu Anggaran	Realisasi	%	%NSPS X Anggaran	Efisiensi Anggaran	%
1	2	3	4	5=1x2	6=5-3	7=(6/2)x100
111.56	Rp 12,448,837,000.00	Rp 12,413,394,401.00	99.72	Rp 1,388,792,255,720.00	Rp 1,376,378,861,319.00	99%

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam menunjang tugas tersebut, Biro Hukum didukung oleh 49 pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun 2019 sampai 2024 sebagaimana tabel berikut





Biro Hukum memaksimalkan penyerapan anggaran agar dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelum pemotongan anggaran. Rendahnya capaian realisasi anggaran Tahun 2024 dikarenakan terdapat optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk mencapai target program dan kegiatan di lingkungan Biro Hukum, yang terdiri dari

1. mengumpulkan data atau bahan usulan melalui grup whatsapp, kemudian setelah terkumpul baru akan diadakan pembahasan, *offline*, dengan itu bisa memangkas pertemuan yang menggunakan anggaran.
2. pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan secara *zoom meeting*;
3. penandatanganan Autentifikasi PUU telah dilaksanakan secara elektronik melalui portal;
4. wadah untuk menghimpun semua data yang diperlukan terkait tugas dan fungsi di Biro Hukum telah dilaksanakan secara *paperless* melalui *google drive* dan *drop box*;
5. optimalisasi sharing informasi melalui *group whatsapp*; dan
6. monitoring dan evaluasi secara berkala pengendalian resiko yang sudah ditindaklanjuti melalui tautan lynk.id/spiprokum sebagai portal informasi SPIP Terintegrasi Biro Hukum; dan





7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja melalui <https://sites.google.com/view/simanjabirohukum/beranda>.

3.3. Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai *Feedback* Perencanaan Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja dapat tercapai dengan baik dan efektif. Saran perbaikan kedepannya untuk menyusun perjanjian kinerja berdasarkan hasil verifikasi tim Inspektorat I dan Biro Perencanaan, dengan uraian sebagai berikut

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Rekomendasi Perbaikan 2025
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Penyediaan Produk Hukum KKP	1 Indeks Reformasi Hukum KKP	Indeks	80	100	Target diusulkan 85
	2 Indeks Kualitas Kebijakan KKP	Indeks	65	83,94	Target diusulkan 85
	3 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	100	100	Target diusulkan 100
	4 Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100	140	Target diusulkan 100
	5 Persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100	140	Target diusulkan 100
	6 Persentase Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	%	100	121,73	Target diusulkan 100
	7 Persentase Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	%	100	116,67	Target diusulkan 100
	8 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92	99	Target diusulkan 92
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum	Nilai	84	88,50	Target diusulkan dari Biro Perencanaan sebesar 87
	10 Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum	Indeks	85	90,18	Target diusulkan dari Biro SDMAO sebesar 87
	11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum	%	100	101	Target diusulkan dari Biro Keuangan sebesar 100
	12 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum	%	94	133,33	Target diusulkan dari Pusdatin sebesar ...
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	%	95	99,72	Target diusulkan dari Biro Keuangan sebesar 95
	14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	%	95	100	Target diusulkan dari Biro Umum dan PBJ sebesar ≥ 95
	15 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyediaan Produk Hukum KKP	%	100	100	Target diusulkan dari Biro Hukum sebesar 100
	16 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Nilai pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Nilai	75	88,75	Target diusulkan dari Inspektorat V sebesar 75





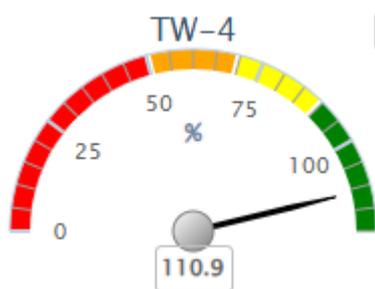
3.4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

Pelaksanaan tindak lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024 merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Berdasarkan surat dinas Sekretaris Jenderal, Nomor B.1253/SJ/RC.610/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024, terdapat 2 (dua) rekomendasi perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Hukum, yang terdiri dari

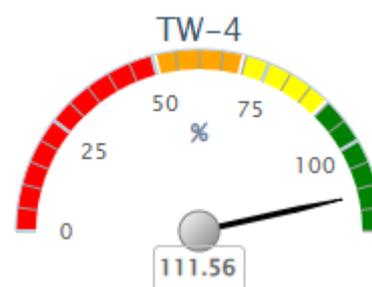
- a. Meningkatkan capaian indikator kinerja tahun 2024 lebih baik dari capaian tahun 2023; dan
- b. Meningkatkan nilai komponen evaluasi internal kinerja pada tahun 2024.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi, terdapat upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh tim Biro Hukum, yaitu

- a. Capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2024 sebesar 111,56%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2023, terdapat kenaikan nilai sebesar 0,66%. Kenaikan nilai kinerja organisasi dikarenakan terdapat 13 indikator kinerja yang mencapai nilai di atas 100%, dengan rincian sebagai berikut



Capaian Kinerja Tahun 2023



Capaian Kinerja Tahun 2024



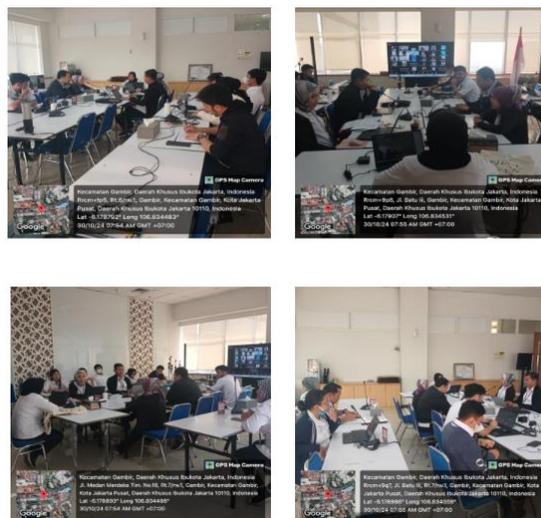


b. Dalam meningkatkan nilai komponen evaluasi internal kinerja pada tahun 2024, telah diadakan beberapa pertemuan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja, yaitu

- 1) Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024-2029 di Lingkup Biro Hukum, yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum, dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum serta dihadiri oleh seluruh pegawai Biro Hukum



- 2) Rapat Penyusunan Penyusunan Anggaran Biro Hukum dan Validasi Indikator Kinerja Tahun 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum, dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum serta dihadiri oleh seluruh pegawai Biro Hukum



- 3) Rapat Tindak Lanjut atas Validasi Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, bertempat di Ruang Kerja Biro Hukum, dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum serta dihadiri oleh seluruh pegawai Biro Hukum



- 4) Dialog Kinerja Organisasi dalam rangka Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2025, bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum, dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum serta dihadiri oleh seluruh pegawai Biro Hukum





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BAB IV

PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA



BAB IV

PRESENTASI DAN KINERJA LAINNYA

Sepanjang tahun 2024, Biro Hukum meraih beberapa penghargaan dari pihak eksternal KKP. Hal ini menjadi suatu pembuktian atas kinerja Biro Hukum dan pemacu untuk berkinerja dengan lebih baik.

Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-OT.03.03-74, tanggal 11 November 2024, hal Hasil Penilaian atas IRH Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks reformasi hukum sebesar **100** dengan kategori AA (Istimewa). KKP berhasil menerima penghargaan Terbaik II Kategori Tingkat Kementerian Hasil Penilaian Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.



Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2023, JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian. Dengan hasil yang diperoleh tersebut, JDIH KKP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 98 (sembilan puluh delapan) dan berada pada peringkat ke-5 (lima).





Selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Biro Hukum telah menghasilkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di bidang kelautan dan perikanan dengan jumlah sebanyak 177 peraturan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun bentuk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Tabel 31
Daftar Peraturan Perundang-undangan pada Laman jdih.kkp.go.id

Tahun	Permen KP	Kepmen KP	Keputusan a.n. Menteri	Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan
2024	32	93	51	1

Pada Tahun 2024, terdapat 7 kasus inkraucht yang seluruhnya dimenangkan oleh KKP, yang terdiri dari

- Perbuatan melawan hukum Perkara 90/Pdt.G/2019/PN. Sorong (MA) terkait materiil tanah dan rumah dinas SUPM Sorong dengan gugatan materiil Rp150 Juta;
- Masalah Hukum Perdata Tanah Kampus Politeknik KP Sorong Papua Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Son, di Pengadilan Sorong, Penguasaan tanah Poltek





- KP Sorong, seluas 8.000 m², dengan gugatan materiil Rp4.000.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00;
- c. Gugatan Judicial Review di MK dengan Nomor perkara 35/PUU-XXI/2023, pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
 - d. Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Thn, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka;
 - e. Gugatan *Class Action* Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Trng, di Pengadilan Negeri Tenggaraong, dengan Para Tergugat salah satunya yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait kegiatan *ship to ship transfer* tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan dan Para Tergugat **tidak melakukan tindakan dan/atau penegakan hukum maupun Tindakan administratif** untuk menghentikan kegiatan *ship to ship transfer* dimaksud (dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp614.461.617.600,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000,00);
 - f. Gugatan Praperadilan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Clp, di Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 21 Juni 2024, terkait dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
 - g. Sengketa Informasi Publik Register Nomor 10/II/KIP-PSI/2023 di Komisi Informasi Pusat, adanya permohonan terkait jenis informasi publik yang diminta yaitu dokumen pengadaan barang dalam Paket Pengadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) paket; laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dan 2021; Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penanganan COVID-19, Tahun Anggaran 2019, tahun 2020, dan tahun 2021;





- h. Gugatan Praperadilan perkara Nomor 9 /Pid/Pra/2024/PN.Jkt.Utr terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, terkait dengan sah tidaknya penggeledahan, penangkapan, penyitaan, penetapan Tersangka, dan penahanan yang dilakukan Termohon

Berdasarkan data tersebut diatas, Biro Hukum telah menyelamatkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp1.619.461.617.600,00.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BAB V PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2024 sebesar 111,56%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2023, terdapat kenaikan nilai poin sebesar 0.9%. Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp12.032.374.432 dengan persentase 99.72%. Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain realisasi beberapa kegiatan yang telah dicapai, yaitu

1. Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-OT.03.03-74, tanggal 11 November 2024, hal Hasil Penilaian atas IRH Tahun 2024, KKP berhasil mencapai nilai indeks reformasi hukum sebesar 100 dengan kategori AA (Istimewa) serta KKP berhasil menerima penghargaan Terbaik II Kategori Tingkat Kementerian Hasil Penilaian Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
2. Penilaian pada tahun 2024 masih menggunakan nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id karena pada tahun 2024 ini tidak terdapat pengukuran indeks kualitas kebijakan sehingga rencana aksi lebih ditekankan dalam rangka persiapan untuk pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2025. Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 83,94 dengan kategori sangat baik;
3. Berdasarkan Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat total rancangan peraturan perundang-undangan sebagai usulan kinerja peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 64 (enam puluh empat) rancangan Peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 35 (tiga puluh lima) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana keseluruhan rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud telah berhasil diselesaikan,





sehingga persentase capaiannya sebesar 100% untuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan 100% untuk yang nonprogram penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024, sehingga persentase capaiannya keseluruhan penyelesaian peraturan perundang-undangan sebesar 100%;

4. Berdasarkan persentase permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, terdapat 11 (sebelas) Permasalahan dari Target 8 (delapan) permasalahan sehingga capaiannya sebesar 140%;
5. Berdasarkan persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di KKP, terdapat 7 (tujuh) permasalahan dari target 5 (lima) permasalahan dalam satu tahun sehingga capaiannya 140%;
6. Berdasarkan presentase perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani pada triwulan IV, terdapat terdapat 28 (dua puluh delapan) dari target 23 (dua puluh tiga) dokumen *legal drafting* perjanjian nasional yang ditindaklanjuti dan diberikan masukan/tanggapan oleh Biro Hukum, sehingga capaian kinerja mencapai 121,73%;
7. Berdasarkan presentase perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum hingga triwulan IV, terdapat 14 (empat belas) dari target 12 (dua belas) konsep naskah perjanjian internasional yang diberikan pertimbangan hukum, dalam hal ini antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional, sehingga capaian kinerja sebesar 116,67%; dan
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2023, JDIH KKP memperoleh nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik IV tingkat Kementerian dari 32 (tiga puluh dua) kementerian.





9. Berdasarkan penilaian di tahun 2024, Nilai PM SAKIP Biro Hukum mencapai 88,50 87.60 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.1253/SJ/RC.610/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024.
10. Berdasarkan memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor B.62/SJ.3/TU.140/I/2024, tanggal 09 Januari 2024, hal Capaian Indikator Kinerja IP ASN Triwulan IV Smstr II Tahun 2024 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *Dashboard* IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu 90,18 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,74, Kompetensi 34,47, Kinerja 28,97, dan Disiplin 5.
11. Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan, Nomor 3626/SJ.2/RC.610/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, hal Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023”, Biro Hukum mendapatkan nilai 101%, dapat diartikan **bahwa tidak ada temuan BPK** di Biro Hukum.
12. Berdasarkan memorandum Kepala Pusat, Data, Statistik dan Informasi Nomor 32/SJ.7/TU.210/I/2024, tanggal 3 Januari 2024, Hal Capaian Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023, Biro Hukum mendapatkan **nilai capaian 133,33**.
13. Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025, tanggal 8 Januari 2025, hal Capaian Indikator Kinerja Utama Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi atau tindak lanjut yang perlu diselesaikan oleh Biro Hukum, sehingga nilai capaian Biro Hukum mencapai 100%.
14. Presentasi realisasi anggaran Biro Hukum pada aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,72%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Biro Hukum dalam melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya *output* yang direncanakan pada saat penganggaran. Selain itu, atas tercapainya presentasi





realisasi anggaran tersebut, Pada tahun 2024, pagu anggaran Biro Hukum sebesar Rp16.217.199.000, namun mendapat blokir 2 kali Automatic Adjustment (AA) dan pengurangan pagu untuk diserahkan ke Biro Umum dan PBJ yaitu Rp3.768.362.000. Sehingga pagu akhir Biro Hukum sebesar Rp12.448.837.000.

15. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum kepada pimpinan unit organisasi eselon II terkait, Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025, tanggal 4 Januari 2025, hal Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab Biro Hukum dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yaitu 1 (satu) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 telah tercapai, sehingga persentase penyelesaian sebesar 100%.
16. Telah dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai di Lingkungan Sekretariat Jenderal, berdasarkan hasil penilaian, Biro Hukum mendapatkan nilai 88,75 dengan keterangan memenuhi syarat dalam rangka Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkup Biro Hukum dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada pimpinan organisasi dan bagi *stakeholders* dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Hukum di masa yang akan datang.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
INDONESIA TOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1.	Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	80
		2.	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65
		3.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		4.	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		5.	Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6.	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		7.	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		8.	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum (Indeks)	85
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum (%)	100
		12.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum (%)	94
		13.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	95
		14.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100
		16.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Biro Hukum (Nilai)	75

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi, dan Kerja sama	
	Layanan Hukum	Rp8.835.000.000
	Layanan Bantuan Hukum	Rp2.165.000.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Layanan Umum	Rp4.500.000.000
	Layanan Perkantoran	Rp2.276.400.000
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2024		Rp17.276.400.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum


Effin Martiana



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIRO HUKUM

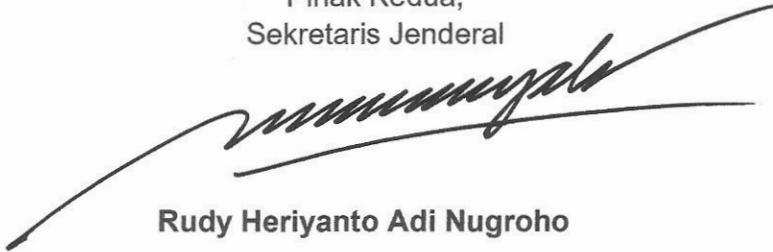
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1.	Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	80
		2.	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65
		3.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		4.	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		5.	Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6.	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		7.	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		8.	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9.	Nilai PM SAKIP Biro Hukum (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (Indeks)	85
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum (%)	100
		12.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro Hukum (%)	94
		13.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95
		14.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100
		16.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hukum (Nilai)	75

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi, dan Kerja sama	
	Layanan Hukum	Rp7.260.182.000
	Layanan Bantuan Hukum	Rp427.169.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Layanan Umum	Rp3.304.860.000
	Layanan Perkantoran	Rp2.176.400.000
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2024		Rp12.861.100.000

Jakarta, 23 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum



Effin Martiana